

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP INFORMASI KINERJA KEUANGAN**

**(Studi Kasus Pada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma
Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan PDAM Tirta
Kamuning Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat
dalam Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun Oleh :

NAMA : YESSI AMANDA SARI
NPM : 0107174

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS WIDYATAMA**

Terakreditasi (Accredited)

SK.Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)

Nomor : 014/BAN_PT/Ak-XII/S1/IV/2009

Tanggal 12 Juni 2009

BANDUNG

2014

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP INFORMASI KINERJA KEUANGAN**

**(Studi Kasus Pada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma
Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan PDAM Tirta
Kamuning Kabupaten Kuningan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat
dalam Menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Disusun Oleh :

NAMA : YESSI AMANDA SARI

NPM : 0107174

**Menyetujui
Dosen Pembimbing**

**(Rima Rachmawati,S.E.,M.Si.,Ak.)
NIP : 1110201069**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi S1

**(Dr. H. Islahuzzaman,S.E.,M.Si.,Ak.)
NIP : 195512181986011001**

**(Erly Sherlita,S.E.,M.Si.,Ak.)
NIP : 1111199056**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yessi Amanda Sari

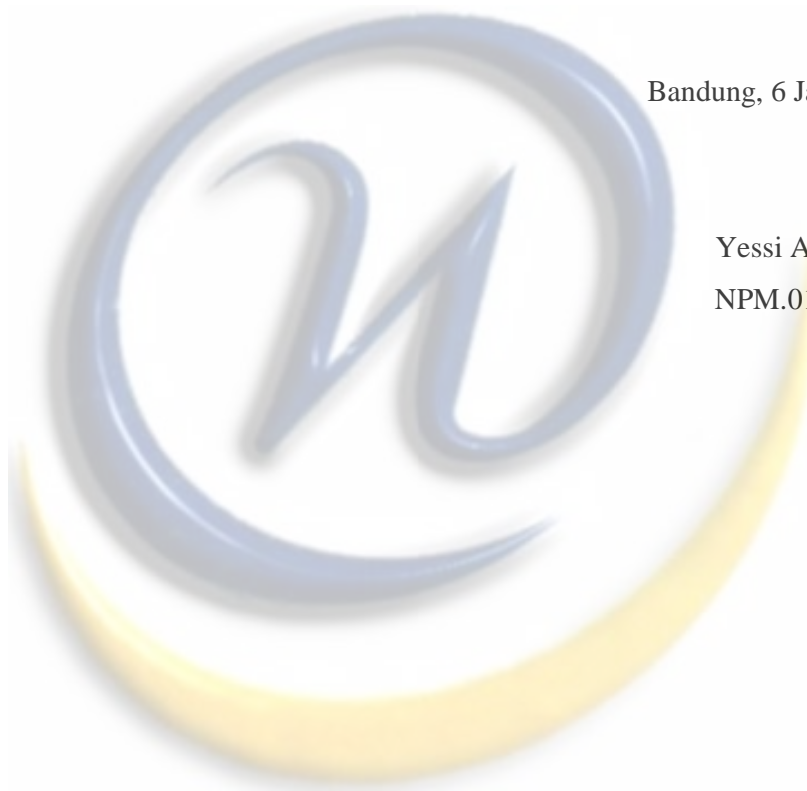
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 23 Juni 1989

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Bila terbukti tidak demikian, saya bersedia menerima segala akibatnya, termasuk segala sanksi yang telah ditentukan.

Bandung, 6 Januari 2014

Yessi Amanda Sari

NPM.01.07.174



ABSTRAK

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu system dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta meminimalisasi resiko dan kesalahan dalam menjalankan usahanya. Penerapan *Good Corporate Governance* akan mendukung bagi terlaksananya informasi kinerja keuangan suatu perusahaan yang dibutuhkan oleh *stakeholders*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari dimensi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*) terhadap informasi kinerja keuangan baik secara simultan maupun parsial pada PDAM Kota Cirebon, PDAM Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada 4 PDAM tersebut yang berjumlah 331 orang, dengan jumlah sample 120 orang karyawan, sehingga angket akan disebar terhadap sample yang tersebar di 4 PDAM tersebut dengan teknik *purposive sampling*. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan kausal dengan pendekatan survey. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan kuadrat terkecil dan uji hipotesis menggunakan uji t dan secara parsial menggunakan uji F dengan tingkat kepercayaan 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 84,1% dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Besarnya nilai persentase pengaruh pada PDAM Kota Cirebon adalah 54,7%, pada PDAM Kabupaten Cirebon adalah 62,8%, pada Kabupaten Sumedang adalah 25,3% sedangkan pada PDAM Kabupaten Kuningan adalah 12,3%. Sedangkan secara terpisah, variabel *Responsibility* (X3) memiliki pengaruh paling besar yakni 19,08%. Sedangkan variabel *Transparency* (X1) memiliki pengaruh paling kecil yakni sebesar 14,11%.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, kemandirian dan informasi kinerja keuangan.

ABSTRACT

Good Corporate Governance is basically a system and set of rules that govern the relationship between the various interested parties (stakeholders) which aims to improve the efficiency, productivity, and minimize risks and errors in the operations. Implementation of good corporate governance to support the implementation of a company's financial performance information required by stakeholders.

This study aims to determine the effect of the implementation of good corporate governance consisting of the dimensions of transparency, accountability, responsibility, fairness and independency of the financial performance information either simultaneously or partially on *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cirebon Regency*, *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cirebon Municipality*, *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumedang Regency*, *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kuningan Regency*. The population in this study were all employees at the 4 taps numbering 331 people, with a sample of 120 employees, so the questionnaire will be distributed to a sample spread over 4 taps with purposive sampling. The method used is descriptive and causal with a survey approach. Analysis technique used in multiple linear regression equation least squares and hypothesis testing using t test and the partial use of the F test with 5% level confidence.

The results showed that at the same time, there is a positive and significant effect of 84.1% of the application of the principles of Good Corporate Governance in the Financial Information on PDAM Cirebon Regency, PDAM Cirebon Municipality, PDAM Sumedang Regency, PDAM Kuningan Regency. The value of the percentage effect on PDAM Cirebon municipality is 54.7%, the PDAM Cirebon Regency was 62.8%, the PDAM Sumedang Regency is 25.3%, while the PDAM Kuningan Regency was 12.3%. meanwhile, separately, the variable Responsibility (x3) have the most impact 19.08%. while Transparency variable (x1) has the least influence which amounted to 14.11%.

Keywords : Good corporate governance, transparency, accountability, fairness, independence, and financial performance information.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Studi kasus pada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan). Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi pembahasan dan penyusunannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat bagi peningkatan kemampuan penulis di waktu yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta do'a dari semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar kepada penulis.
2. Ayah dan Ibu tercinta (H. Tjetjep Rachmat,S.Ip dan Hj. Yatti Rusmiaty) yang telah membesarkan dan mendidik penulis serta selalu memberikan doa dan kasih sayang serta perhatian moril dan materiil kepada penulis dengan segala keikhlasannya.
3. Yang terhormat Ibu Rima Rachmawati,S.E.,M.Si.,Ak., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K.,M.S.,Ak.,Alm selaku ketua badan pengurus Yayasan Widyatama Bandung.
5. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir.,D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama Bandung.
6. Yang terhormat Bapak H. Islahuzzaman.S.E.,M.Si.,Ak. selaku Dekan Universitas Widyatama Bandung

7. Yang terhormat Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
8. Yang terhormat Ibu Intan Oviantari, S.E., M.Si., Ak., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
9. Yang terhormat ibu Surgitianingsih selaku dosen wali.
10. Yang terhormat seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama atas bimbingan dan didikannya sehingga telah memberikan bekal wawasan pengetahuan selama masa perkuliahan.
11. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatamayang telah memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Suamiku tercinta dan anakku tersayang (AKP. Rachmadi Yusuf Budiman, S.H dan Gadis Jaudah Starsia) kalian adalah bagian terpenting dalam hidupku, yang mengisi hari-hariku. Terimakasih atas perhatian cinta dan kasih sayang dan juga selalu setia mendukungku.
13. Ayah dan Ibu mertuaku tersayang (Kombes. Drs. H. Sumoro dan Hj. Sri Sudiastuti) terimakasih atas doa dan dukungannya.
14. Yang terhormat Bapak Drs. Hamid Ahmad selaku Kepala Bagian Umum PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, Bapak H. Suharyadi, S.E., selaku Pjs Direktur PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, Bapak Suarno, S.Sos., selaku Dirut PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, serta pihak-pihak lain yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Dikdik Rahmat Mulyana, guru sekaligus penasihat terbaik yang tidak pernah bosan selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Yang terhormat Ibu Ketua Bhayangkari Polres Cirebon beserta jajaran pengurus bhayangkari Polres Cirebon yang sudah tiga tahun ini menjadi lingkungan baru penulis, memberikan banyak pengalaman dan selalu setia memberikan semangat dan motivasi.
17. Semua teman-teman seperjuanganku semasa kuliah sampai akhirnya skripsi ini selesai dikerjakan.

18. Dan semua pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis. Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya dan juga membalas semua kebaikan dan ketulusan hati yang telah penulis dapatkan.

Bandung, 6 Januari 2014

Penulis

YESSI AMANDA SARI

NPM. 0107174



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu	10
1.4.2 Aspek Pengembangan Praktis	10
1.5 Metodologi Penelitian	12
1.5.1 Jenis dan Sumber Data	12
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Mengenai <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.1.2 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	17
2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	24
2.1.4 Struktur <i>Good Corporate Governance</i>	29
2.1.5 Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i>	32
2.1.5.1 Komisaris Independen	32
2.1.5.2 Komite Audit	33
2.1.5.3 Jumlah Saham yang diperdagangkan	35

2.2 Informasi Kinerja Keuangan	35
2.2.1 Pengertian Informasi	35
2.2.1.1 Kualitas Informasi	36
Nilai Informasi	36
2.2.2 Kinerja Keuangan	37
2.2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan	37
2.2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan	38
2.2.2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan PDAM	39
2.2.2.4 Analisis Informasi Kinerja Keuangan Perusahaan	41
2.3 Pengaruh Penerapan GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan	43
2.4 Kerangka Pemikiran	45
2.5 Hipotesis Penelitian	48
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	49
3.1 Objek Penelitian	49
3.1.1 Profil Perusahaan	49
3.1.1.1 Sejarah Singkat PDAM	49
3.1.1.2 Struktur Organisasi PDAM	52
3.1.1.3 Uraian Tugas	53
3.1.1.4 Aspek Kegiatan PDAM	62
3.2 Metode Penelitian	63
3.2.1 Metode yang digunakan	63
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	64
3.2.3 Teknik Pengembangan Instrumen	65
3.2.4 Populasi dan Sampel Penelitian	66
3.2.4.1 Populasi	66
3.2.4.2 Sampel	67
3.2.5 Operasional Variabel	68
3.2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	72
3.2.7 Teknik Pengolahan data	74

3.2.7.1 Uji Asumsi Klasik	75
3.2.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda	76
3.2.7.3 Analisis Korelasi	78
3.2.7.4 Koefisiensi determinasi	80
3.2.7.5 Uji Hipotesis	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
4.1 Hasil Penelitian	83
4.1.1 Data Responden	83
4.1.2 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG	86
4.1.2.1 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon	89
4.1.2.2 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Cirebon	90
4.1.2.3 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Sumedang	92
4.1.2.4 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Kuningan	93
4.1.2.5 Rekapitulasi Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon, Kab.Cirebon, Kab.Sumedang, Kab.Kuningan	95
4.1.3 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan	96
4.1.3.1 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon	99
4.1.3.2 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Cirebon	100
4.1.3.3 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Sumedang	101
4.1.3.4 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Kuningan	102
4.1.3.5 Rekapitulasi Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon, Kabupaten	

Cirebon, Kabupten Sumedang, Kabupaten Kuningan	103
4.2 Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan	105
4.2.1 Uji Asumsi Klasik	105
4.2.2 Analisis Regresi untuk Data Keseluruhan	109
4.2.3 Analisis Regresi untuk Data PDAM Kota Cirebon	117
4.2.4 Analisis Regresi untuk Data PDAM Kab.Cirebon	123
4.2.5 Analisis Regresi untuk Data PDAM Kab.Sumedang	128
4.2.5 Analisis Regresi untuk Data PDAM Kab.Kuningan	134
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	140
5.1 Kesimpulan	140
5.2 Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	146

DAFTAR TABEL

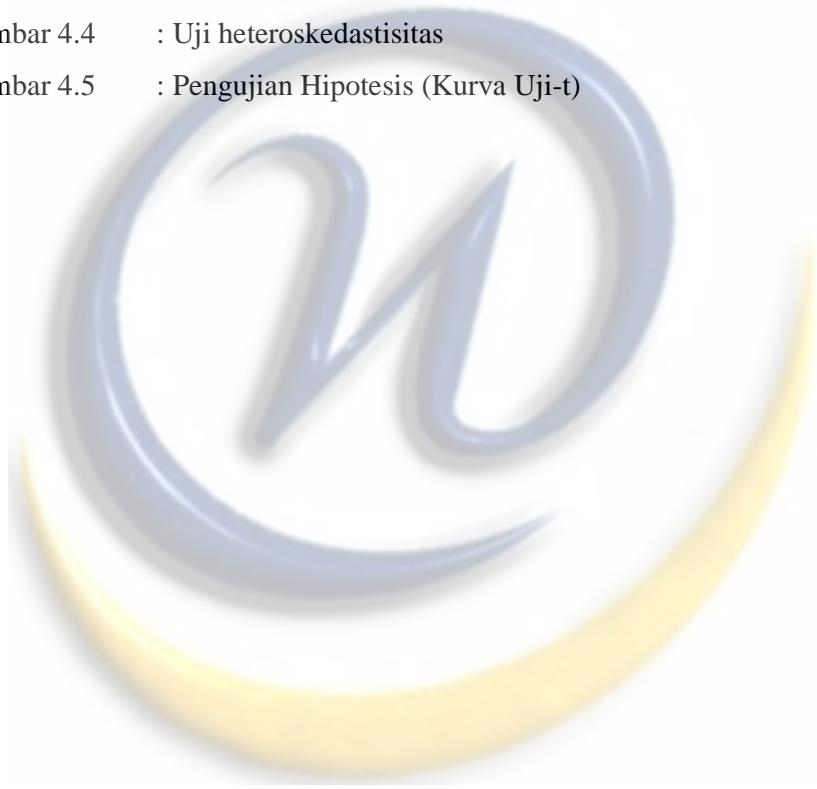
Tabel 1.1	: Rekapitulasi Nilai Kinerja PDAM hingga 2011	4
Tabel 1.2	: Laporan Kinerja Keuangan 4 PDAM (Kab.Cirebon, Kota Cirebon, Kab.Kuningan, dan Kab.Sumedang)	6
Tabel 3.1	: Jumlah Karyawan pada 4 PDAM	65
Tabel 3.2	: Operasional Variabel	67
Tabel 3.3	: Skor Jawaban	69
Tabel 3.4	: Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi	71
Tabel 3.5	: Kekuatan Hubungan antara Variabel X dan Y	77
Tabel 4.1	: Wilayah Kerja Dinas PDAM	82
Tabel 4.2	: Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah Kerja	83
Tabel 4.3	: Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG (X)	85
Tabel 4.4	: Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon	88
Tabel 4.5	: Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Cirebon	90
Tabel 4.6	: Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Sumedang	91
Tabel 4.7	: Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Kuningan	93
Tabel 4.8	: Rekapitulasi Penerapan Prinsip GCG	94
Tabel 4.9	: Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan (Y)	96
Tabel 4.10	: Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon	98
Tabel 4.11	: Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Cirebon	99
Tabel 4.12	: Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Sumedang	100
Tabel 4.13	: Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Kuningan	101
Tabel 4.14	: Rekapitulasi Informasi Kinerja Keuangan	103

Tabel 4.15	: Uji Autokorelasi	106
Tabel 4.16	: Uji Multikorelasi	108
Tabel 4.17	: Persamaan Regresi Linear Berganda	109
Tabel 4.18	: Analisis Koefisien Determinasi Simultan	112
Tabel 4.19	: Analisis Koefisien Determinasi Parsial (Uji t)	113
Tabel 4.20	: Uji Hipotesis Simultan (Uji F)	115
Tabel 4.21	: Uji Hipotesis Parsial	116
Tabel 4.22	: Uji Regresi	117
Tabel 4.23	: Kekuatan Hubungan antara variabel X dan Y	119
Tabel 4.24	: Tabel Koefisien	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: <i>The Structure of Corporate Governance</i>	29
Gambar 2.2	: Model <i>Two-Board System</i> di Indonesia	31
Gambar 2.3	: Kerangka Pemikiran	47
Gambar 3.1	: Kurva Uji t	80
Gambar 4.1	: Garis Kontinum	87
Gambar 4.2	: Garis kontinum	97
Gambar 4.3	: Uji Normalitas dengan menggunakan metode scater plot	105
Gambar 4.4	: Uji heteroskedastisitas	118
Gambar 4.5	: Pengujian Hipotesis (Kurva Uji-t)	121



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Survey
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Perusahaan
- Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 4 : Output SPSS Tabulasi Silang
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 : Surat Revisi Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan *multiplier effect* yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat khususnya di daerah. Pendirian BUMD diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)¹. Layaknya sebuah perusahaan, BUMD memiliki tugas untuk mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, di mana dengan adanya keuntungan tersebut akan menjadi pemasukan bagi daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat di setiap propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan dimonitor oleh pemerintah daerah. PDAM sebagai perusahaan daerah diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air bersih serta melayani semua kelompok konsumen dengan harga yang terjangkau. Selain itu, PDAM bertanggung jawab pada operasional sehari-hari, perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi proyek, serta

¹ Asep Ahmad Saefulloh, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BUMD, Studi Kasus di Propinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. 2009. Jurnal "Kajian" No.1 Vol.15 Maret 2009

bernegosiasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan layanan kepada masyarakat².

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Salah satu tujuan PDAM adalah turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi persyaratan kesehatan bagi masyarakat di suatu daerah, yang sekaligus merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

Apabila merujuk pada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang sehat. Untuk itu dalam perspektif ke depan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah termasuk di dalamnya adalah PDAM diharapkan mampu mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam penyelenggaraannya.

Good Corporate Governance (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) seperti

² Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.11 Tahun 2011

yang dikutip oleh Indra dan Yustivandana (2006:24) mendefinisikan *Good Corporate Governance* ialah :

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dari definisi di atas GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian, penerapan GCG bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka pihak manajemen akan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta meminimalisasi resiko dan kesalahan dalam menjalankan usahanya.

Dari hasil penilaian terhadap kinerja 335 PDAM di seluruh Kota dan Kabupaten, sebanyak 145 PDAM berada dalam kondisi yang sehat, sedangkan 103 perusahaan berada dalam kondisi kurang sehat dan sisanya sebanyak 87 perusahaan berada dalam kategori yang sakit³. Hasil tersebut berdasarkan penilaian pada kinerja keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia. Katagori Sehat, adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan. PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas

³ BPPSPAM, "Kinerja PDAM 2011" Mei 2012

dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya. Sedangkan PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Nilai Kinerja PDAM hingga 2011

PROPINSI	SEHAT	KURANG SEHAT	SAKIT	JUMLAH
DKI Jakarta	1	-	-	1
Banten	5	1	-	6
Jawa Barat	16	4	2	22
Jawa Tengah	31	4	-	35
DIY Yogyakarta	4	1	-	5
Jawa Timur	19	11	8	38
Jumlah (Wilayah I)	76	21	10	107
Prosentase (Wilayah I)	71,03 %	20,56 %	8,41 %	100 %
Jumlah (Nasional)	145	103	87	335
Prosentase (Nasional)	43,28 %	30,75 %	25,97 %	100 %

Sumber : BPPSPAM, "Kinerja PDAM 2011", Mei 2012

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah PDAM yang berada dalam kategori kurang sehat dan sakit lebih banyak dibandingkan dengan kategori yang sehat. Di Jawa Barat sendiri terdapat 16 PDAM berada dalam kategori sehat, 4 PDAM kurang sehat, dan 2 PDAM yang berada dalam kategori sakit. PDAM yang berada dalam kategori kurang sehat dan sakit, merupakan PDAM yang memiliki kinerja keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia di bawah standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut dialami oleh 4 PDAM yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Kuningan yang berada dalam kondisi kurang sehat, serta PDAM Kabupaten Sumedang dan Kota Sukabumi yang berada dalam kategori sakit. Dari beberapa PDAM yang berada dalam kategori kinerja kurang sehat dan sakit,

penelitian ini akan mengambil sampel PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang berada dalam kondisi kurang sehat dan PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

Di antara PDAM yang ada di berbagai kota dan kabupaten Di Jawa Barat (Wilayah II), PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon dan PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon merupakan salah satu PDAM yang kinerjanya berada dalam kategori “Sehat”. Berdasarkan Laporan BPPSPAM pada bulan Mei 2012, PDAM tersebut dinilai mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan.

Meskipun demikian, dalam penilaian kinerja keuangan, PDAM Tirta Jati belum dapat menghasilkan laba, bahkan selalu merugi. Pada laporan keuangan tahun 2010, *Return Of Equity* (ROE) PDAM Tirta Jati tercatat minus 2,7%, dari tahun sebelumnya 0%. Rasio Operasi pun hanya mencapai 1,02%, artinya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai penghasilan kurang efisien. Permasalahan yang menyebabkan PDAM Kabupaten Cirebon selalu menderita kerugian adalah tarif yang rendah. Dari 19 PDAM di Provinsi Jawa Barat, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berada di urutan paling bawah. Selain itu, PDAM Tirta Jati juga menanggung hutang sebesar Rp 7 Milyar kepada Bank Dunia dan juga hutang pajak non-air sebesar Rp 630 juta. Hal tersebut juga dialami oleh PDAM Kota Cirebon. Akibat harga jual yang rendah dan di bawah rata-rata, dan tingkat kebocoran air sebesar 20% menyebabkan pada laporan keuangan tahun 2012 perusahaan ini mengalami kerugian. Selain itu, pada kedua BUMD tersebut manajemen kerja belum sepenuhnya profesional berlandaskan pada penerapan

teknologi informasi dan kompetensi sehingga berdampak pada permasalahan kinerja manajerial keuangan dan pelayanan.

Tabel 1.2
Laporan Kinerja Keuangan 4 PDAM (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sumedang)

Kinerja Keuangan	PDAM Kab. Cirebon		PDAM Kota Cirebon		PDAM Kabupaten Kuningan		PDAM Kabupaten Sumedang	
	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja		Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
1. Rentabilitas								
a. ROE	0.0%	-2,7%	3.8%	5.5%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%
b. Rasio Operasi	1.36%	1.02	0.89	0,92	0,92	1,08	1,09	0,99
2. Likuiditas								
a. Rasio Kas	3%	173%	42%	61%	4%	12%	3%	4%
b. Efektivitas Penagihan	98.2%	96,2%	99,5%	93,7%	91,24%	89,7%	98,4%	
3. Solvabilitas	135%	179%	1170 %	929%	463%	254%	199%	191%
4. Kategori	Kurang Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Sehat	Kurang sehat	Kurang sehat	Sakit

Sumber : BPPSPAM, "Kinerja PDAM 2011", Mei 2012

Salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja perusahaan adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dikatakan sehat jika perusahaan dapat menjalankan proses bisnis dan manajemen yang baik sehingga diharapkan akan menghasilkan *customer* yang puas dan berdampak terhadap kenaikan pendapatan dan akan menghasilkan karyawan yang produktif dan memiliki komitmen tinggi untuk menghasilkan *value* bagi *customer*, sehingga diharapkan berdampak pada penurunan biaya dalam jangka panjang.

Salah satu upaya agar dapat terus berkembang, perusahaan perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dan pengembangan usaha. Salah satu upaya adalah dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang dapat menghasilkan *feed back* bagi

pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien. Penilaian terhadap aspek keuangan masih sangat perlu untuk dilakukan karena penilaian kinerja dilihat dari aspek keuangan perusahaan dapat memberikan gambaran apakah strategi, sasaran strategi, inisiatif strategi, dan implementasi, mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba/ rugi bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat bertahan hidup, berhasil, dan sejahtera. Hasil pengukuran kinerja ini dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan dan juga sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan.

Untuk memperoleh penilaian kinerja yang baik, maka diperlukan prinsip penilaian yang tepat sehingga dapat dihindari hasil yang dapat mengaburkan dan menyembunyikan kemampuan perusahaan dalam mencapai suatu nilai yang ekonomis di masa yang akan datang. Salah satu prinsip penilaian kinerja yang tepat untuk menilai kinerja perusahaan adalah dengan menggunakan prinsip *good corporate governance* (GCG), yang terdiri atas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*).

Perpaduan kelima dimensi *Good Corporate Governance* ini jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan prinsip yang hanya mementingkan aspek keuangan saja. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan terutama BUMN dan BUMD yang menerapkannya hanya semata-mata karena mengikuti perundang-undangan dan menghindari sanksi, dibandingkan dengan kesadaran menjadikan prinsip GCG tersebut sebagai bagian dari kultur perusahaan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *good corporate*

governance dan bagaimana pengaruhnya terhadap informasi kinerja keuangan perusahaan, sehingga mandasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP INFORMASI KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan).** Penelitian ini akan dilakukan pada PDAM di Jawa Barat dengan kondisi kinerja yang beragam, yaitu Sehat, Kurang Sehat dan Sakit, untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai penerapan *good governance* dan informasi kinerja keuangan pada PDAM di wilayah Propinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab pendahuluan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimana penerapan prinsip GCG di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan
- b. Bagaimana penyajian informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan
- c. Mengapa terdapat PDAM yang berada dalam kondisi yang sehat tetapi tidak dapat meraih keuntungan

- d. Bagaimana pengaruh penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui penerapan prinsip GCG di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan
- b. Mengetahui informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan
- c. Mengetahui faktor yang menyebabkan PDAM yang berada dalam kondisi sehat tetapi tidak dapat meraih keuntungan.
- d. Mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian dapat berguna dan juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari aspek ilmu maupun aspek praktis.

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam bidang pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan.

1.4.2 Aspek Pengembangan Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Menambah wawasan serta memahami tentang GCG yang selama ini penulis peroleh dari artikel-artikel dan membandingkan dengan kenyataan yang ada pada dunia usaha khususnya di BUMD serta untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di Indonesia.
- 2) Memberi sarana penulis untuk melatih kemampuan teknis dalam membandingkan ilmu pengetahuan teori dengan pelaksanaan yang sebenarnya.
- 3) Melatih penulis dalam membuat karya ilmiah serta menerapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh di bangku kuliah.

b. Bagi Organisasi yang Diteliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada pihak PDAM untuk:

- 1) Menerapkan praktik *Good Corporate Governance* di lingkungan perusahaan sehingga menjadi bagian dari kultur organisasi, khususnya dalam memberikan informasi kinerja keuangan.

- 2) Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap informasi kinerja keuangan, yang nantinya dapat ditinjau lanjut untuk kepentingan peningkatan kinerja perusahaan.

c. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan pembandingan bagi tulisan lain yang sama-sama membahas hal sejenis, dan dapat juga berguna bagi pihak yang hanya ingin tahu, maupun bagi mereka yang berminat menelaah hasil penelitian ini.

1.5 Metodologi Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah penelitian serta berdasarkan teori yang digunakan, maka penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kausal. Penelitian kausal bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali fakta yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu (Narbuko dan Achmadi, 2010:49).

1.5.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penyelidikan langsung pada perusahaan.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

1. Observasi dan Pengamatan

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu hal atau kejadian, untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya.

2. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai masalah objek penelitian yang dibahas.

3. Kuesioner

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada para responden yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literatur-literatur baik dari buku-buku ekonomi maupun majalah-majalah ilmiah yang dimaksudkan untuk mendukung kebenaran data primer.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon, PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang dan PDAM Tirta Kamuning Kuningan. Adapun penelitian ini dilakukan pada Januari 2013 sampai dengan selesainya skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mengenai *Good Corporate Governance*

2.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting di Indonesia karena perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh dan berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak atau belum melaksanakan GCG, sehingga akan membantu perusahaan-perusahaan tersebut menjadi lebih kompetitif secara global. *Corporate governance* merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja perusahaan serta memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perusahaan untuk berkembang dengan lebih baik dan sehat.

Secara umum *Good Corporate Governance* (GCG) lebih ditujukan untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para *stakeholder* karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja, dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian GCG yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit dan perspektif yang luas.

Wahyudi Prakarsa (2009:5), memberi pengertian tentang *good corporate governance* yaitu: “Sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*)”.

Effendi (2009:1) menyimpulkan definisi *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Sedangkan definisi *good corporate governance* menurut **Bank Dunia (*World Bank*) yang dikutip oleh Effendi (2009:2)** adalah:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para *stakeholder* lainnya dan pada akhirnya akan terhindar dari benturan peran.

Menurut KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 pada pasal 1a, *good corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai nilai etika. Serta pada pasal 1d, *stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik

langsung maupun tidak langsung yaitu pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak berkepentingan lainnya.

Sedangkan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *Good Corporate Governance* ialah:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dari definisi di atas GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input, proses, output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan.

Dalam tataran konsep, GCG merupakan suatu sistem mengenai bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi. Oleh karena itu, struktur GCG seharusnya mencakup pengertian sebagai berikut :

1. Adanya pemisahan antara hak dan kewajiban antara pelaku dalam perusahaan seperti manajemen, pemegang saham dan stakeholders. Disamping itu harus terdapat pemisahan yang jelas pula antara manajemen dan pemilik perusahaan.
2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada

prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

2.1.2 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip merupakan suatu kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah :

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Sehingga menunjukkan perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya dan kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:39) menyatakan bahwa informasi yang harus diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lain yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat

kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepatwaktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan dapat pula mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlakukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Selain itu, prinsip akuntabilitas agar perusahaan dikelola dengan benar sesuai dengan kepentingan perusahaan maka disini perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaannya.

Mulyadi (2005:75) mengartikan akuntabilitas dengan kemampuan organisasi dalam beberapa hal, yaitu:

“Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi dalam hal :

1. Menyadari tentang dampak keuangan setiap tindakan personel
2. Menghargai waktu kerja personel untuk memberikan layanan yang bernilai tambah bagi customer.
3. Menyadari besarnya investasi dealam medical equipment dan memanfaatkan secara *optimum equipment* tersebut untuk memenuhi kebutuhan *customer*.
4. Menjunjung tinggi pengetahuan untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh customer.
5. Menerapkan pengetahuan ke dalam pekerjaan”

Berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas Tri Gunarsih (dalam Achmad Daniri (2006:14) menyatakan:

“Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, Komite Audit, serta remunerasi eksekutif. *Good Corporate Governance* memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balanced* di perusahaan”

Mulyadi (2005:76) mengungkapkan alasan tentang pentingnya akuntabilitas, yaitu : “(1) Bisnis modern umumnya adalah padat modal dan padat pengetahuan; (2) Perusahaan sekarang berada dalam jaman teknologi informasi; (3) Karyawan harus melek informasi keuangan”.

Untuk menjalankan bisnis modern, diperlukan investasi besar dalam sumber daya manusia, teknologi, dan aktiva tetap. Investasi besar dalam tersebut perlu dimanfaatkan oleh oleh personel dengan akuntabilitas tinggi untuk memungkinkan dihasilkannya Return On Investment(ROI) yang memadai. ROI memadai inilah yang menjajikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan perusahaan sehingga keberadaan perusahaan bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuain di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang

berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Peraturan perundangan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup kesehatan atau keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu organ perusahaan harus patuh terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan sehingga perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial seperti peduli pada masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Berkaitan dengan hal ini Griffin dan Ebert (1995:136) memberikan area tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu:

“The evolution of social responsibility areas of social responsibility:

- 1. Responsibility toward the environment*
- 2. Responsibility toward customers*
- 3. Responsibility toward employees*
- 4. Responsibility toward investors”*

Tantangan besar dalam dunia bisnis adalah mengatasi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu masalah ini harus

menjadi tanggung jawab perusahaan. Praktek bisnis oleh perusahaan yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab terhadap konsumennya dapat dipastikan akan kehilangan bisnisnya. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab terhadap karyawannya sangat beresiko kehilangan karyawan yang produktif dan bermotivasi tinggi. Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, melalui prinsip ini juga diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. (Achmad Daniri, 2005:11).

4. Independensi (*independency*)

Agar perusahaan bisa berjalan dengan baik maka seluruh organ perusahaan harus bertindak hanya untuk kepentingan perusahaan dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya *conflict of interest*. Menurut Hery (2010:12) menyatakan bahwa: “perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain”.

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat sekali penting sekali dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus

mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Independensi bagi para anggota direksi terwujud dalam keputusan transaksi yang seharusnya tidak mengandung benturan kepentingan dan atau tidak mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang dikelolanya selain dari gaji dan fasilitas sebagai anggota direksi, yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan atau pedoman pada berbagai tingkatan.

Dari pernyataan tersebut berarti seluruh organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

5. Keadilan dan Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Menurut Adrian Sutedi (2011:12) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak investor atau pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dari berbagai kejahatan demi terlaksananya komitmen antara investor.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, serta ras.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi (2008:42) memberikan pernyataan bahwa : “Pelaksanaan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha”.

Dari pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal ini berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Dunia usaha sebagai pelaku pasar yang menerapkan GCG maka harus menjalankan usahanya dengan sehat, efisien, dan transparan, serta masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa

maka harus melakukan melakukan kontrol sosial dengan memperhatikan terhadap pelayanan masyarakat yang dilakukan pemerintah serta kegiatan produk atau jasa yang dihasilkan dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Pelaksanaan GCG dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 1 Agustus 2002 pada pasal 4, yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional
- f. Mensukseskan program privatisasi

Menurut H.J. Wierman Pamuntjak seperti di tulis dalam buletin Audit internal edisi No. 020/2003, manfaat dari penerapan GCG antara lain ;

a. Meningkatkan kinerja perusahaan ;

Praktek GCG sangat menentukan terhadap kinerja perusahaan, proses pengambilan keputusan yang lebih baik akan lebih meningkatkan efisiensi operasional serta akan meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham.

b. Memudahkan perolehan dana yang lebih murah, GCG memungkinkan diperolehnya kepercayaan pada pemodal, baik investor dalam negeri maupun investor asing, sehingga kebutuhan perusahaan akan sumber-sumber investasi yang murah akan lebih mudah di dapat dari pasar modal

c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Praktek GCG akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga dengan demikian juga akan mendorong terciptanya dinamika ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan para investor, maka praktek GCG akhirnya akan mendorong terjadinya arus investasi serta menciptakan investasi baru, sehingga dengan demikian akan meningkatkan lapangan kerja serta pendapatan masyarakat.

d. Peningkatan pendapatan bagi pemegang saham.

e. Menjadi katalisator bagi perubahan /pertumbuhan kesejahteraan masyarakat terutama melalui *self policing* .

f. Meningkatkan peran *shareholders* dalam kemajuan perusahaan, karena masing-masing *shareholders* menjadi semakin aktif mengamati serta memberi masukan-masukan bagi kemajuan operasional.

Adapun keuntungan yang diperoleh dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* pada perusahaan adalah:

1) Menurunkan risiko

Dengan melaksanakan GCG akan dapat meminimalkan praktek-praktek KKN yang terjadi di perusahaan. Praktek-praktek yang tidak sehat tersebut jika dibiarkan akan menyebabkan risiko-risiko kerugian perusahaan bahkan kebangkrutan.

2) Meningkatkan nilai saham

Diterapkannya GCG merupakan indikator perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan investor atau publik terhadap perusahaan dengan meningkatnya kepercayaan akan menjadikan nilai sahamnya banyak diminati di bursa, sehingga akan berdampak positif pada kenaikan nilai saham.

3) Menjamin kepatuhan

Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur dan operasi perusahaan ditujukan untuk mengatur aktivitas dan hubungan yang saling menguntungkan antar pihak yang terkait. Keseimbangan dengan seluruh stakeholders mengarahkan perusahaan pada kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan.

4) Memiliki daya tahan

Dengan melaksanakan GCG perusahaan akan lebih memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia usaha sekitarnya.

5) Memacu kinerja

Melalui mekanisme supervisi kinerja manajemen dan mempertegas pertanggung jawaban komisaris dan direksi kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya akan memacu jajaran komisaris dan direksi meningkatkan kinerja perusahaan.

6) Meningkatkan akuntabilitas publik

GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh stakeholders dan tentunya ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik.

7) Membantu penerimaan negara

Dengan transparansi dan dipatuhinya peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara yang meningkat. Khususnya bagi BUMN dengan kinerja yang prima akan meningkatkan laba operasi dan nilai saham yang tinggi sehingga akan meningkatkan bagian laba pemerintah.

Maka jika setiap perusahaan semakin banyak menerapkan GCG maka semakin cepat pemulihan ekonomi yang akan dapat dirasakan seluruh masyarakat secara nasional. Seperti misalnya pergerakan dan pertumbuhan ekonomi akan

meningkat dengan baik, kesempatan kerja semakin besar, kemampuan bersaing lebih tinggi baik lokal maupun internasional.

Menurut **Muh. Arief Effendi (2009 : 65)**, manfaat dari penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

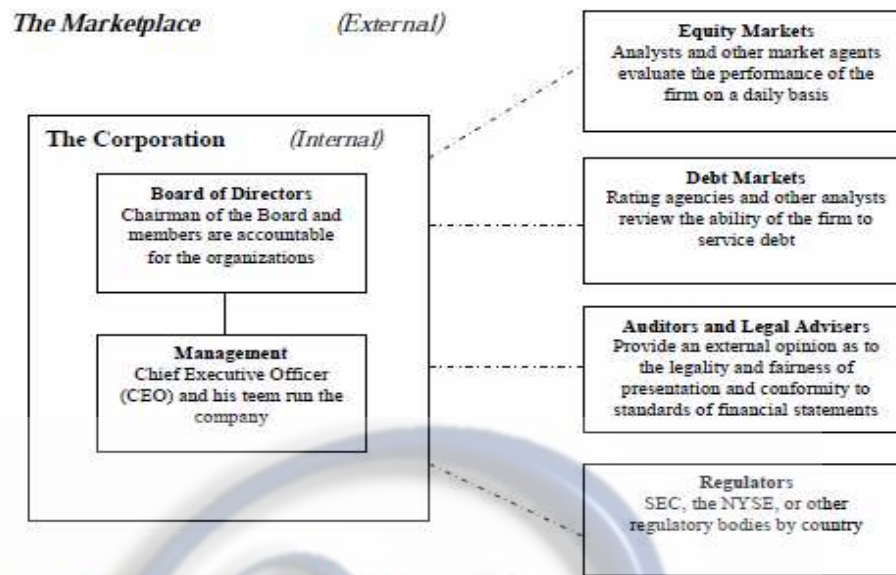
1. Peningkatan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.
2. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan
3. Peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
4. Kemudahan untuk memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak kaku (karena faktor kepercayaan), yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).
5. Peningkatan minat investor untuk membeli saham yang bersangkutan.

Berangkat dari beberapa tujuan diatas, maka pelaksanaan GCG pada perusahaan diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada perusahaan, pertumbuhan industri dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan pertumbuhan industri ketika melaksanakan GCG.

2.1.4 Struktur *Corporate Governance*

Struktur dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Struktur *corporate governance* menunjukkan hubungan antar berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang berguna dalam menentukan arahan strategis serta mengawasi kinerja perusahaan.

Struktur *Corporate Governance* menurut Gray dan Radebaugh (2009:82) adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
The Structure of Corporate Governance

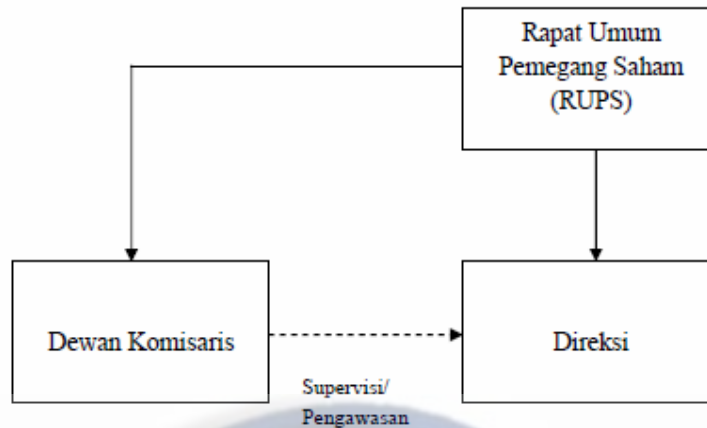
Umumnya terdapat 2 (dua) model struktur internal *corporate governance* di dunia, yaitu *The Anglo-American system* dan *The Continental Europe system*. Model *Anglo-American* merupakan model yang digunakan di US dan UK (Kamal, 2010) serta Kanada, dimana struktur *governance* terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (*executive directors non-executive directors*), serta *executive managers* yang dipimpin oleh CEO. Model ini disebut juga *single* atau *one-board system*, karena dalam *Board of Directors* tidak memisahkan keanggotaan Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) dan Direksi.

Sementara model *Continental Europe* merupakan model yang digunakan di Jepang dan Jerman (Kamal, 2010) serta Prancis, dimana struktur *governance* terdiri dari RUPS, *Board of Commissioners* (Dewan Komisaris) sebagai dewan pengawas, dan *Board of Directors* (Dewan Direksi) sebagai eksekutif perusahaan

atau manajemen. Pemisahaan keanggotan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi inilah yang dikenal dengan model *dual board system* atau *two-board system*.

Pada dasarnya struktur *governance* diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya entitas (Arifin, 2005). Adapun perbedaan mendasar antara *English common law* dengan *codified civil law* ditandai dengan ada atau tidaknya juri dalam sistem pengadilan suatu negara. Indonesia termasuk katagori negara dengan basis *codified civil law*, karena dalam sistem pengadilan di Indonesia tidak terdapat juri.

KNKG (2006) menyatakan bahwa kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian penerapan model *two-board system* dalam struktur *governance* di Indonesia berbeda dengan model Continental Europe, di mana wewenang pengangkatan dan pemberhentian Direksi berada di tangan RUPS. Sehingga dalam model *two-board system* di Indonesia kedudukan Direksi sejajar dengan kedudukan Dewan Komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perseroan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.



Gambar 2.2
Model *Two-Board System* di Indonesia

Sumber: FCGI, 2001 (dikutip dari Mulia, 2010)

2.1.5 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Bentuk mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata kolola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Good Corporate Governance penting dengan tujuan untuk mengawasi kinerja para manajer. Mekanisme ini akan menjamin bahwa para investor akan menerima tingkat return yang sesuai dengan investasi yang telah mereka lakukan (Scheiver dan Vishny, 2007). Dennis dan McConnell (2008:72) membedakan mekanisme *Good Corporate Governance* menjadi dua bagian yaitu internal dan

eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku.

2.1.5.1 Komisaris Independen

Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang signifikan dalam penentuan strategi perusahaan. Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem *two tier*, yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan fungsi *monitoring* terhadap kinerja manajemen, sedangkan dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan (Wardhani, 2007:43). Berdasarkan *The National Committee on Corporate Governance* (2000) dalam Siswantaya (2007:17) menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan dewan komisaris. Diantaranya adalah fungsi dewan komisaris untuk mengawasi direksi baik yang berhubungan dengan kebijakan dan pelaksanaan direksi. Kedua, dewan komisaris berfungsi untuk memberikan saran kepada direksi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka anggota dewan komisaris merupakan seorang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan.

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP – 339/BEJ/07 – 2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari dewan

komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial.

2.1.5.2 Komite Audit

Salah satu komite penunjang yang dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-29/PM/2004, Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan Komite Audit, setiap Emiten atau Perusahaan Publik berkewajiban untuk memiliki Komite Audit dan pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*). Adapun ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diatur dalam Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 (KNKG), adalah sebagai berikut :

- a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- b. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;

Komite Audit merupakan salah satu mekanisme kontrol atas organ perusahaan yang sangat penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan dan mendorong manajemen agar mengungkapkan lebih banyak informasi. Keefektifan fungsi Komite Audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian terdahulu (Klein, 2002; Davidson, et al., 2005; dalam Yuen, et al., 2009) mengindikasikan

bahwa terdapat hubungan positif antara independensi komite audit dengan keefektifan *corporate governance*.

Komite audit dianggap lebih efektif dalam memonitor laporan keuangan perusahaan sehingga diharapkan komite memiliki intensitas pertemuan yang cukup untuk dapat lebih baik dalam memonitor masalah seperti manajemen laba. Dengan intensitas pertemuan yang rutin, diharapkan akan menciptakan komunikasi yang baik dalam komite, sehingga komite akan semakin efektif dalam melakukan pengawasan dan mengurangi perilaku oportunistik manajemen seperti praktek manajemen laba.

2.1.5.3 Jumlah Saham yang Diperdagangkan

Struktur kepemilikan saham merupakan salah satu dari mekanisme *Good Corporate Governance*. Jensen dan Meckling (dalam Junaidi, 2007:62) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan saham merupakan salah satu mekanisme pengawasan dimana mekanisme ini dapat menurunkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Dampsey dan Laber (1993:87) membagi struktur kepemilikan saham menjadi dua jenis, yaitu: *insider ownership* dimana saham dimiliki oleh pemilik perusahaan yang sekaligus menjadi pengelola atau saham dimiliki oleh manajer perusahaan tersebut dan kedua, *outsider ownership* dimana saham dimiliki pihak dari luar perusahaan.

2.2 Informasi Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Informasi

Menurut Gordon B Davis (2002:32) informasi adalah "data yang telah diolah ke dalam suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata atau berupa nilai yang dapat di pahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan".

Kemudian Barry E. Cushing (Yogianto, 1992:24) mengemukakan bahwa "informasi menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang yang menerimanya". Dari kutipan-kutipan tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi yang menerimanya, dan menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.

2.2.1.1 Kualitas Informasi

Akurat, dalam hal ini informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerimaan informasi banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Tepat pada waktunya, informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak mempunyai nilai lagi, karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat untuk

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda.

2.2.1.2 Nilai Informasi

Nilai dari informasi ditentukan oleh 2 hal, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan mendapatkannya.

Informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya karena sebagian informasi dinikmati tidak hanya oleh satu pihak di dalam suatu perusahaan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa informasi yang digunakan di dalam suatu sistem informasi umumnya digunakan untuk beberapa kegunaan. Sehingga tidak memungkinkan dan sulit untuk menghubungkan suatu bagian informasi pada suatu masalah yang tertentu dengan biaya untuk memperolehnya, karena sebagian besar informasi tidak hanya dinikmati oleh satu pihak di dalam perusahaan. lebih lanjut sebagian besar informasi tidak dapat persis ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.

2.2.2 Kinerja Keuangan

2.2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Istilah kinerja atau *performance* ini seringkali dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan menurut S. Munawir (2010:64) adalah “prestasi kerja yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan yang bersangkutan.” Sedangkan Agnes Sawir

(2005:1) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai “kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan sebuah prestasi atau hasil akhir yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu atas aktivitas yang dilakukannya dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia.

2.2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Untuk mengetahui baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan, menurut Bambang Riyanto (2008:25) ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam menganalisis dan menilai kondisi keuangan perusahaan tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau yang harus segera dibayar. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam keadaan likuid. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu maka perusahaan berada dalam kondisi illikuid. Artinya, kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi kurang baik dan dampaknya dengan segera perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan. Likuiditas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan *current ratio*, *quick ratio* atau *acid test ratio*.

2. Solvabilitas (*Solvability*)

Solvabilitas ini menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau membayar kewajiban saat perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan dapat dikatakan *solvable* apabila perusahaan tersebut mampu membayar semua utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Sebaliknya jika jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka perusahaan dapat dikatakan *insolvable*. Artinya, kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi kurang baik dan dampaknya perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan keuangan saat perusahaan dibubarkan. *Solvabilitas* perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity* (membandingkan total utang dengan modal sendiri), *long term leverage* (membandingkan total utang jangka panjang dengan modal sendiri) dan *short term leverage* (membandingkan total utang jangka pendek dengan total modal sendiri).

3. Profitabilitas/ Rentabilitas (*Profitability*)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas digunakan untuk menilai kesuksesan perusahaan dalam memperoleh laba dan mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya, sama halnya seperti rentabilitas. Oleh karena itu, profitabilitas juga dapat dikatakan sebagai rentabilitas. Bagi manajemen perusahaan dan investor, profitabilitas yang tinggi lebih penting daripada laba yang besar.

2.2.2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan PDAM

Pengukuran kinerja keuangan PDAM sendiri berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja

Perusahaan Daerah Air Minum. Dalam Kepmen tersebut dijelaskan mengenai tingkat keberhasilan PDAM seperti pada pasal 3 :

Ayat (1) Tingkat keberhasilan PDAM adalah:

- a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
- b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
- c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
- d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
- e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.

Ayat (2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah:

- a. Aspek Keuangan 45;
- b. Aspek Operasional 40;
- c. Aspek Administrasi 15.

Ayat (3) Indikator aspek keuangan terdiri atas:

1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
2. Rasio Laba terhadap Penjualan;
3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
4. Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
7. Rasio Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo;
8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
9. Jangka Waktu Penagihan Piutang;

10. Efektivitas Penagihan.

2.2.2.4 Analisis Informasi Kinerja Keuangan Perusahaan

Di lingkungan usaha, secara umum masih ada anggapan bahwa laba merupakan salah satu tolok ukur dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Untuk mengetahui secara cermat, maka perlu adanya pengamatan agar diperoleh suatu acuan untuk mengukur kinerja tersebut. Ikatan Akuntansi Indonesia (1996:5) memberikan penjelasan tentang kinerja, yaitu: "informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumberdaya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan". Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dan sumber daya yang ada. Di samping itu, informasi kinerja juga dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Esensi dari definisi di atas adalah bahwa, pertama, terminologi kinerja mengacu pada terminologi yang bersifat sangat umum sehingga apabila tidak diberikan batasan-batasan yang jelas dalam pengaplikasiannya, maka terminologi ini akan mengarah kepada ukuran-ukuran yang sebagian besar bersifat kualitatif dan pada akhirnya hanya akan mempertemukan pada rangkaian kesatuan yang dibatasi oleh tolok ukur yang sangat buruk pada ekstrim yang satu, dan sangat baik pada ekstrim yang lainnya, dan jika dikaitkan pada kendala subjektivitas dalam pengukuran secara umum hanya memberikan satu kecenderungan pilihan pada ekstrim tengah cukup atau sedang.

Kedua, untuk meminimalkan resiko subjektivitas dalam pengukurannya dan penilaiannya, maka terminologi ini perlu diaplikasikan dengan mengacu pada

himpunan atau bagian himpunan aktivitas yang didefinisikan dengan jelas dan dikaitkan dengan kesatuan pelaksana himpunan dan atau sub himpunan kegiatan yang juga perlu didefinisikan secara jelas. Ketiga, rentang waktu sangat penting dalam penetapan kinerja. Jika kita mengambil suatu organisasi usaha sebagai kesatuan pelaksanaan kegiatan dan seluruh kegiatan usaha sebagai himpunan kegiatan, maka pertumbuhan laba pada awal-awal usia organisasi usaha yang bersangkutan secara umum tidak dapat kita jadikan tolok ukur rasional bagi kinerja organisasi bersangkutan, secara umum diakui bahwa pertumbuhan laba adalah salah satu unsur dari kinerja organisasi usaha. Sebaliknya, untuk organisasi usaha yang telah lama *go public*, pertumbuhan laba saja tidaklah cukup untuk menilai kinerja organisasi usaha tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Moch. Faisal Salam (2003:90) mengungkapkan bahwa untuk menentukan keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi. Aspek keuangan ini merupakan suatu penilaian tentang keadaan perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki perusahaan yang dapat dilihat dari rasio kas dan rasio lancar dan sebagainya. Aspek operasional merupakan suatu penilaian tentang keadaan perusahaan yang menggambarkan kegiatan-kegiatan perusahaan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi perusahaan serta sejauh mana realisasi rencana kerja perusahaan tersebut. Sedangkan aspek administrasi merupakan suatu penilaian yang menggambarkan kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaannya.

2.3 Pengaruh Penerapan GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan

Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif karena dengan menerapkan GCG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing di tingkatan direksi, komisaris, komite-komite, dan lain-lain serta aturan main yang baku berdasarkan prinsip-prinsip tersebut.

Effendi (2009:1) menyimpulkan definisi *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Sedangkan definisi *good corporate governance* menurut

Bank Dunia (*World Bank*) yang dikutip oleh Effendi (2009:2) adalah:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep *good corporate governance*, yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu. Yang ke dua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan

terhadap semua informasi kinerja perusahaan terutama informasi kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders* (Prakarsa, 2009:5).

Dalam penerapannya *good corporate governance* tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang mendasari lahirnya *good corporate governance* tersebut, dimana prinsip-prinsip *good corporate governance* yang mempunyai hubungan dengan informasi kinerja keuangan sekaligus dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan tersebut diantaranya menurut Zarkasyi (2008:39):

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Informasi yang harus diungkap meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lain yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
2. **Pengungkapan (*disclosure*)**, yang merupakan penyajian informasi kepada berbagai pihak pemegang kepentingan mengenai berbagai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko perusahaan.
3. **Akuntabilitas**, yang berkaitan dengan pertanggung jawaban BOC dan BOD atas keputusan manjerial dan hasil kinerja usaha yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam

mengelola perusahaan. BOC dan BOD perlu menyampaikan laporan realisasi pencapaian kinerja usahanya dikaitkan dengan pencapaian target-target usaha yang ditetapkan dalam *business plan* dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara rutin dan tepat waktu kepada publik.

Sedangkan menurut H.J. Wierman Pamuntjak seperti di tulis dalam buletin Audit internal edisi No. 020/2003, manfaat dari penerapan GCG di antaranya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas publik, dimana penerapan GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh *stakeholders* yang diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik.

2.4 Kerangka Pemikiran

Dengan telah dipahaminya penerapan prinsip *good governance* pada sektor publik, maka untuk mengkaitkannya dengan penerapan *good governance* di sektor swasta berikut ini perlu dipahami tentang *good corporate governance*. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ditetapkan bahwa: *Corporate Governance* adalah suatu proses dan yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai tata

kelola perusahaan yang dapat memberikan jaminan untuk berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, bertanggungjawab, kemandirian dan akuntabilitas. Dalam usulan penelitian ini, penerapan prinsip GCG lebih ditekankan pada Badan Usaha Milik Negara, karena dianggap kurang memperhatikan dalam hal penerapan GCG tersebut. Sedangkan definisi dari Komite Nasional GCG Indonesia :

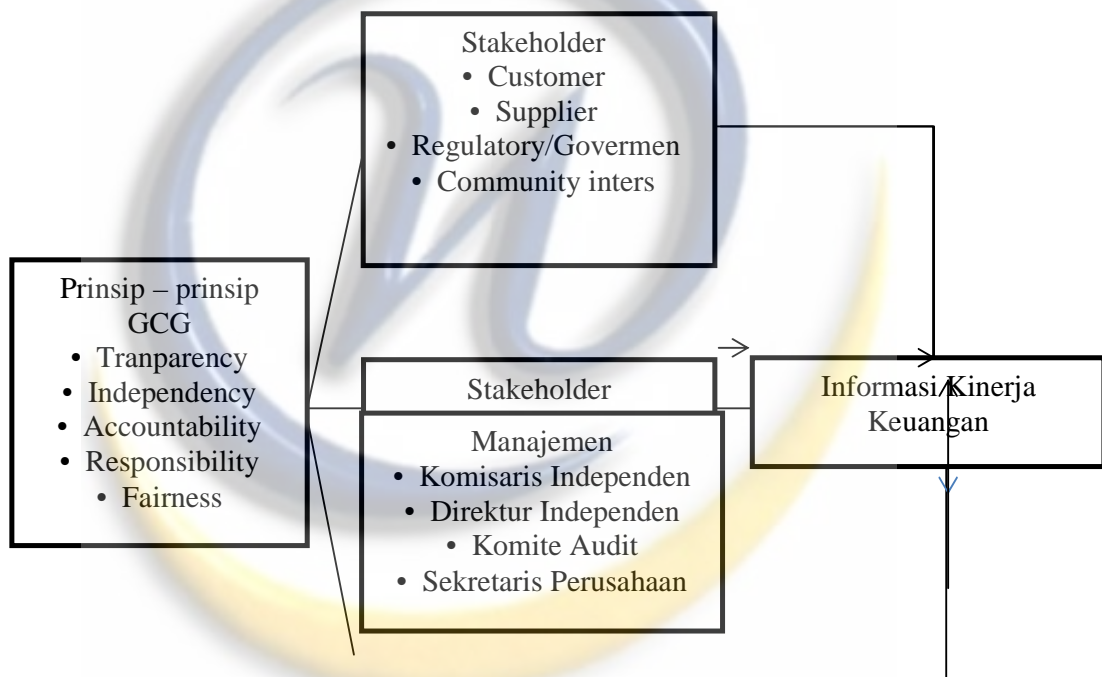
GCG merupakan pola hubungan, sistem serta yang digunakan organ perusahaan (direksi, komisaris) guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders lainnya. Pola hubungan, sistem, serta proses itu sendiri, berjalan berdasarkan empat prinsip, yakni : transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan responsibilitas.

Sedangkan menurut Indra Surya (2006:24) *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai tata cara pengelolaan perusahaan yang baik sebagaimana mestinya. Pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri. Ikatan Akuntan Indonesia (1996:5) memberi penjelasan tentang kinerja sebagai berikut :

Informasi kinerja perusahaan terutama apabila dilihat dari probabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumberdaya yang ada. Disamping itu, informasi kinerja juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumberdaya.

Hubungan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kinerja keuangan sangat erat sekali karena GCG bukan semata-mata hanya slogan belaka tetapi merupakan sesuatu yang menjwai kinerja perusahaan khususnya kinerja keuangan perusahaan, yang harus benar-benar diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran mendukung bagi

terlaksananya informasi kinerja keuangan suatu perusahaan yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Menurut Pamuntjak (2003), penerapan GCG mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh *stakeholders* yang diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, sehingga hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan akuntabilitas publik. Penjelasan kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2006: 70). Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan hipotesis yaitu

“Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Mempunyai Pengaruh Yang Positif Terhadap Informasi Kinerja Keuangan Suatu Perusahaan”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Governance* dan informasi kinerja keuangan pada PDAM Kota dan Kabupaten Cirebon. Dalam penelitian ini, pengambilan data dan informasi adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan informasi kinerja keuangan pada PDAM Kota dan Kabupaten Cirebon. Dengan menggunakan objek tersebut, maka diharapkan akan teruji apakah terdapat pengaruh di antara keduanya, dengan pengertian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan *Good Corporate Governance* dan informasi kinerja keuangan.

3.1.1 Profil Perusahaan

3.1.1.1 Sejarah Singkat PDAM Kota dan Kabupaten Cirebon

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon didirikan sejak jaman penjajahan Hindia Belanda dan sampai saat ini perusahaan telah banyak mengalami perubahan mulai dari produksi sampai kepada jumlah pelanggan yang dilayani dan daerah cakupan pelayanannya. Pada tahun 1930 Pemerintah Belanda mulai membangun fasilitas penyediaan dan pengelolaan air bersih untuk masyarakat Kota Cirebon dari sumber air yang berada di desa Cipaniis + 22 km dari Kota Cirebon dengan kapasitas sebesar 30 liter/detik.

Pada tahun 1968 dirintis usaha melalui DPT Dirjen Cipta Karya Departemen PUTL, dengan mulainya pra survei dalam rangka pinjaman kredit

dari Bank Dunia untuk keperluan rencana pengembangan PDAM Kota Cirebon yang dilaksanakan oleh ICIS Consultant. Dari hasil pra survei tersebut, Kota Cirebon mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk pembuatan master plan air minum, sebagai pelaksana telah ditunjukl Nihon Suido Consultant dari Jepang.

Pada tahun 1977 di mulai pelaksanaan program segera yaitu merehabilitasi menara air Gunung Sari dan Parujakan serta penggantian pipa tua dan pemanfaatan Over Flow. Pelaksanaan program utama meliputi pembangunan Collector well Cipaniis dan pemasangan pipa transmisi dari Desa Cipaniis sampai ke Kalitanjung.

Pada tahun 1984 Pemerintah Swiss menyetujui Master Plan dan menugaskan Alpin Consultant untuk menyusun perencanaannya. Pemda beserta DPRD menetapkan Perda No.1 tahun 1986 tanggal 8 Februari 1986 mengenai retribusi air kotor. Dalam usaha untuk menyempurnakan administrasi kepegawaian sesuai dengan Perda No.4 tahun 1988 tanggal 31 Maret 1988 telah ditetapkan ketentuan badan pengawas, direksi dfan kepegawaian PDAM Kota Cirebon.

Pada tahun 1992 perkembangannya menghasilkan :

- a. Tingkat kebocoran dapat dotekan dari 52 % tahun 1982 menjadi 21,93 % tahun 1992.
- b. Penduduk yang terlayani meningkat dari 25 % menjadi 95 %
- c. Daerah pelayanan meningkat dari 30 % menjadi 88 %
- d. PDAM telah berhasil meningkatkan jumlah pelanggan dari 7800 pada tahun 1981 menjadi 41.637 pelanggan pada Triwulan II / 1996.

- e. Tingkat kebocoran air dapat ditekan dari 50 % pada tahun 1981 menjadi 20,39 % sampai dengan Triwulan II / 1996
- f. Pengaduan pelanggan tercatat sebanyak \pm 50 pelanggan per bulan atau rata-rata \pm 2 pelanggan per hari.

Pada tahun 1994, telah ditetapkan Perda Kodya DT II Cirebon No.13 tentang pengelolaan air minum dan air limbah oleh PDAM Kodya DT II Cirebon.

3.1.1.2 Struktur Organisasi PDAM Kota Cirebon.

Struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon mengacu pada keputusan Walikotamadya Kepala DT II Cirebon No.19 tahun 1994 yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1994 mengenai struktur organisasi dan tata kerja PDAM Kotamadya DT II Cirebon yang dijabarkan dalam berbagai petunjuk teknis yang dibuat oleh Direktur Utama PDAM Kota Cirebon.

Adapun struktur organisasi PDAM Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama membawahi :
 - a. Direktur Bidang Umum
 - b. Direktur Bidang Teknik
 - c. Satuan Pengendalian Intern
 - d. Satuan Penelitian dan Pengembangan
2. Direktur Bagian Umum membawahi :
 - a. Bagian keuangan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Pelayanan Langgan
3. Direktur Bidang Teknik

- a. Bagian Produksi dan Transmisi
 - b. Bagian Distribusi
 - c. Bagian perencanaan Teknik
 - d. Bagian Air Limbah
4. Satuan Pengendalian Intern
 5. Satuan Penelitian dan Pengendalian

Bagian-bagian yang ada dalam susunan organisasi membawahi kepala seksi, kepala seksi membawahi kepala urusan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

3.1.1.3 Uraian Tugas

Untuk lebih jelas dalam melihat hubungan yang tergambar dalam struktur organisasi berikut ini dijabarkan mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut :

- 1. Direktur Utama**, tugasnya :
 - a. Membantu Walikota dibidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah kepada masyarakat.
 - b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
 - c. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Direktur Bagian Umum, tugasnya ;

- a. Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pengadaan barang, sumber pendapatan dan belanja, kekayaan perusahaan serta kelancaran sistem atau mekanisme kegiatan operasional perusahaan.
- b. Mengkoordinasi dan mengendalikan tugas bagian administrasi keuangan kepegawaian, pelayanan langganan, pengelolaan barang dan ketatnya perusahaan.

Untuk melaksanakan tugas ini, Direktur Bagian Umum membawahi :

1. Bagian Keuangan
2. Bagian Umum
3. bagian Pelayanan Langganan

3. Bagian Keuangan, tugasnya :

- a. Melaksanakan semua kegiatan keuangan untuk kelancaran perusahaan yang meliputi menyusun dan mengevaluasi proyeksi keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang serta menjaga likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaan.
- b. Memberikan laporan, saran dan pertimbangan kepada direktur bidang umum sesuai dengan tugasnya.
- c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan dari seksi anggaran, seksi penagihan, seksi akuntansi dan seksi kas.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala bagian keuangan dibantu oleh :

- a. **Seksi anggaran**, tugasnya mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran perusahaan secara sistematis tiap tahun dan mengusulkan rencana perubahan anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya seksi anggaran dibantu oleh
Urusan perencanaan keuangan dimana mempunyai tugas :

- 1) Membantu Kepala Seksi Anggaran dalam bidang tugasnya.
- 2) Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun secara sistematis.
- 3) Menyusun proyeksi keuangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

b. Seksi Penagihan, tugasnya :

- 1) Melaksanakan kegiatan menerima dan menyimpan rekening air dari seksi pengelolaan data untuk dipersiapkan penagihannya.
- 2) Menyerahkan atau membagikan rekening kepada petugas penagihan dari bank yang ditunjuk.
- 3) Melaksanakan administrasi penagihan secara baik dan teratur sehingga memudahkan untuk mengetahui rekening yang tertagih maupun yang tidak tertagih.

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi penagihan dibantu oleh :

Penagihan Lapangan, tugasnya :

- a. Menerima, menyimpan dan membagikan rekening kepada petugas penagih berdasarkan kode wilayah.
- b. Melaksanakan administrasi piutang, pelanggan secara sistematis.
- c. Mengatur, memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penagih agar dapat bekerja dengan berdaya guna dan berhasil guna sesuai wilayah kerjanya.

- d. Memberikan laporan mengenai jumlah rekening yang diterima, rekening yang diselesaikan pembayarannya, rekening yang dihapus atau dirubah dan sisa rekening yang ada secara rutin berdasarkan wilayah.

Penagihan Khusus, tugasnya :

- a. Menerima, menyimpan dan menyerahkan rekening secara rutin dan sistematis kepada bank atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kode wilayah.
- b. Secara periodik menerima, memeriksa dan mencatat nota kredit rekening air dari bank atau pihak lain yang ditunjuk.
- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan, menampung permasalahan dari bank atau pihak lain yang ditunjuk serta mengusahakan pemecahan atau jalan keluarnya.
- d. Memberikan laporan mengenai jumlah rekening yang diterima, rekening yang diselesaikan pembayarannya dan sisa rekening yang ada secara rutin berdasar kode wilayah.

Seksi Akuntansi, tugasnya :

- a. Melaksanakan pembukuan semua transaksi keuangan perusahaan dengan tepat waktu
- b. Menyesuaikan dan memeriksa pembukuan pada buku pembantu dan buku besar.
- c. Mengawasi, menganalisa pembukuan dan penghitungan biaya pokok produksi serta penjualan kembali maupun penggolongnya.

- d. Memeriksa penyusunan laporan keuangan dan lampiran-lampiran untuk pimpinan perusahaan dan pihak lain yang berwenang.
- e. Membantu pengawasan intern dan ekstern serta aparat pengawas fungsional lainnya dalam penyediaan data dan bahan yang diperlukan.
- f. Secara berkala mengadakan prakiraan dan analisa terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, mengadakan penilaian dan koreksi terhadap penyusunan anggaran biaya.

Dalam melaksanakan tugasnya seksi akuntansi dibantu oleh :

Urusan Akuntansi Umum, tugasnya :

- a. Mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan dengan menggunakan model formulir yang telah ditentukan baik mengenai dokumen intern maupun ekstern.
- b. Membuat buku jurnal mengenai rekening, jurnal penerimaan kas, jurnal pembayaran kas, jurnal umum dan menyelenggarakan sistem voucher.
- c. Membuat laporan keuangan secara periodik seperti bulanan/ triwulan/ tahunan, yang meliputi penyusunan neraca, daftar L / R, arus kas (*Cash Flow*) dan rasio perbandingan analisa laporan keuangan.

Urusan Akuntansi Khusus, tugasnya :

- a. Mencatat semua transaksi biaya dalam buku jurnal.

- b. Mencatat transaksi dalam buku besar dan buku pembantu biaya, serta mengelompokkan kedalam biaya langsung usaha, biaya umum dan biaya administrasi.
- c. Mencatat dan membukukan piutang ragu-ragu rekening air yang dihapuskan.

Seksi Kas, tugasnya :

- a. Menerima hasil pembayaran rekening air atau pembayaran lainnya dari seksi penagihan dan menyetorkannya ke bank.
- b. Menyetor seluruh hasil penerimaan penagihan secara rutin pada hari berikutnya di bank yang telah ditentukan, menyimpan dan mengatur likuiditas kas dan keperluan kas perusahaan.
- c. Melaksanakan pencatatan dan administrasi kas dengan ketentuan yang berlaku serta membuat laporan mengenai jumlah alat pembayaran dan kertas berharga yang disimpan.

Disalam melaksanakan tugasnya, seksi kas dibantu oleh :

Urusan Loker kas, tugasnya :

- a. Menerima setoran dan pembayaran rekening air
- b. Mencatat, menghitung dan mencocokkan dengan kas register serta penyetoran seluruh penerimaan kepada seksi kas.
- c. Melaksanakan pencatatan dan administrasi penerimaan.

Urusan Pembayaran, tugasnya : Mengatur dan melaksanakan pembayaran kas atas kewajiban dan keperluan perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.

Bagian Umum, tugasnya :

- a. Menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang administrasi perusahaan, kesejahteraan karyawan, humas atau portokol dan perundang-undangan.
- b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan sistem, metode dan prosedurnya.

Bagian umum dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Logistik
3. Seksi Pemeliharaan, Perawatan dan Bengkel
4. Seksi Kepegawaian
5. Seksi Pengolahan Data
6. Urusan Satuan Pengamanan
7. Urusan Humas dan Protokol

Bagian Pelayanan Langgan, tugasnya :

- a. Membantu dan bertanggungjawab kepada Direktur Bidang Umum.
- b. Melakukan penyaluran meter air dan penggunaan air berdasarkan meter.
- c. Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langgan dan mengurus penagihan rekening langgan.
- d. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan dan pengelolaan data langgan.

- e. Menyelenggarakan penyuluhan dan menciptakan hubungan baik dengan langganan.
- f. Menyelenggarakan survey langganan.
- g. Membuat laporan bulanan.

Bagian Pelayanan langganan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

1. Seksi Pencatatan Meter air.
2. Seksi Pelayanan Sambungan Baru.
3. Seksi Pengaduan dan Jasa Pelayanan.

Bidang Teknik

Direktur Bidang Teknik mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan produksi, pengolahan kualitas dan distribusi air minum dan air limbah serta pemeliharaan seluruh jaringan instalasi pipa, saluran air limbah, peralatan teknis dan bangunan air.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Bidang Teknik dibantu oleh :

1. Bagian Produksi dan Transmisi.
2. Bagian Distribusi.
3. Bagian Perencanaan Teknik.

Satuan Pengendalian Intern, tugasnya :

- a. Menyusun rencana / program kerja pemeriksaan tahunan.

- b. Melaksanakan pemeriksaan yang meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen, keuangan dan operasional agar pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- c. Menganalisa dan mengendali akan terhadap semua sistem, prosedur, mekanisme kerja, pelaporan dan mengusulkan penyempurnaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaporkan hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya kepada Direktur Utama sebagai bahan pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan manajemen satuan penelitian dan pengembangan.
- e. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi kegiatan kelompok jabatan fungsional.
- f. Melakukan perencanaan atau program pengembangan daerah pelayanan sistem jaringan distribusi, teknik produksi, pengolahan distribusi air dan keuangan.
- g. Memberikan laporan, saran dan mempertimbangkannya kepada direktur utama sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1.1.4 Aspek Kegiatan PDAM Kota Cirebon

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon menjalankan beberapa jenis usaha, yaitu :

1. Pelayanan air bersih / air minum.

Dalam mengelola air bersih jenis sumber air yang dimanfaatkan PDAM Kota Cirebon berasal dari mata air yang ditampung dengan pengumpul

Horizontal di Cipaniis. Dari sumur pengumpul, air dialirkan melalui pipa yang berdiameter 250 dan 350 ke bangunan pengolahan untuk diolah dengan metode sulzer, air yang dialokasikan, diinjeksikan ke udara agar CO₂ agresif yang berbahaya dapat dikeluarkan melalui injeksi udara tersebut.

Sistem aliran air adalah dengan sistem gravitasi, air ditampung dalam reservoir dan dicuci hamakan dengan gas Chlor kemudian dialirkan melalui pipa transmisi, pipa distribusi, pipa dinas dan sambungan ke rumah-rumah dan dipasang meter air dengan diameter tertentu untuk merekam pemakaian air melalui meter air yang terpasang.

2. Pengelolaan air limbah dengan cara menyediakan kolam oksidasi untuk wilayah Cirebon Utara yaitu kolam oksidasi kesenden, untuk wilayah Tengah yaitu kolam oksidasi Ade Irma, untuk Perumnas Utara kolam oksidasi Gelatik dan untuk Perumnas Selatan kolam oksidasi Rinjani.
3. Pelayanan penyedotan tinja menggunakan kendaraan operasional sedot tinja door to door dan pemeriksaan badan air kotor untuk mengetahui kadar pencemarannya agar dapat diturunkan kadar pencemarannya.
4. Melayani permohonan sumbangan baru air minum dan pemeriksaan air melalui laboratorium untuk mengetahui kadar kandungan yang terdapat dalam air agar tidak membahayakan kesehatan.
5. Menampung dan melayani setiap jenis pengaduan pelanggan.
6. Melaksanakan pemasangan air limbah atau penyambungan dan perbaikan saluran serta mengatur sistem air limbah.

7. Melaksanakan kegiatan rutin terhadap pengukuran dan pencatatan badan air kotor untuk mengurangi kadar pencemaran yang dapat membahayakan penduduk, pengawasan aliran, pengoperasian pompa, pembersihan bak pengumpulan, pembersihan dan pemeliharaan kolam oksidasi.
8. Mengadakan peninjauan lapangan dan pengamatan untuk rencana pemasangan pipa baru atau rehabilitasi pipa distribusi, transmisi dan saran lainnya.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Metode yang Digunakan

Dalam suatu penelitian, metode merupakan cara untuk menguji suatu hipotesis yang diajukan, dengan mempergunakan teknik serta alat tertentu, (Surakhmad, 2002:121). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kausal dengan pendekatan survey. Menurut Hermawan (2006:17) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Metode deskriptif memiliki cara-cara yaitu memusatkan diri pada pemecahan yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Kemudian data-data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis (Surakhmad, 2002:140). Sedangkan metode kausal adalah metode untuk menjelaskan hubungan dari fenomena yang bersifat sebab akibat (Sugiyono, 2010:37).

Metode deskriptif dan kausal digunakan karena penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena yang diteliti, yaitu mengenai penerapan *Good Corporate Governance* dan informasi kinerja keuangan sekaligus menjelaskan seberapa

besar pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan informasi kinerja keuangan pada PDAM Kota dan Kabupaten Cirebon.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan survei. Metode survei menurut Nazir (2003: 56) adalah:

Penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang intuisi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Metode survei membedah serta menguliti serta mengenal masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan survei adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai sekelompok manusia ataupun objek tertentu dengan mengadakan penelitian untuk memperoleh fakta-fakta sehingga dapat membuktikan objek-objek yang diamati tersebut.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Field research* (Penelitian lapangan), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung sumber data yang dianalisis. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan data-data tersebut adalah:
 - (a) Menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disiapkan sebelumnya untuk diisi oleh responden yang telah ditentukan.
 - (b) Wawancara yaitu tanya jawab untuk memperoleh informasi.

- (c) Observasi yaitu serangkaian kegiatan yang dilaksanakan penulis dengan jalan mengamati secara langsung sumber data yang dianalisis.
 - (d) Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data laporan keuangan, kinerja perusahaan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- 2) *Library research* (Penelitian kepustakaan), yaitu dengan cara mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Teori ini diperlukan untuk terutama sebagai penunjang tinjauan pustaka dan sebagai dasar untuk membandingkan dengan permasalahan yang sebenarnya. Data yang diperoleh dari penelitian merupakan data sekunder yang akan menjadi landasan teoritis bagi pelaksanaan analisis yang akan dilakukan.

Data yang diperoleh akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari, sehingga akhirnya didapat sebuah kesimpulan yang akan menjawab permasalahan. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan analisis agar lebih mudah dipahami dan ditindaklanjuti.

3.2.3 Teknik Pengembangan Instrumen

Instrumen adalah alat untuk menghimpun data. Adapun data yang dikumpulkan ada 2 jenis, yaitu : Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara, dan kuesioner yang merupakan hasil dari penelitian. Laporan Data Sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, data kepustakaan dan merupakan hasil penelitian kepustakaan.

Data yang dikumpulkan diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Adapun kuesioner yang akan digunakan penulis dalam pengumpulan data terdiri atas 2 bagian, yaitu :

1. Pertanyaan Umum

Pertanyaan umum dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka, menyangkut identitas responden, diantaranya : nama, jabatan, pendidikan terakhir, lama bekerja, yang kemungkinan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas menentukan jawabannya.

2. Pertanyaan Khusus

Pertanyaan khusus adalah pertanyaan yang berhubungan dengan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan informasi kinerja keuangan dalam bentuk pertanyaan tertutup. Untuk pertanyaan tertutup, responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain yaitu menggunakan variasi jawaban yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Alternatif jawaban yang diberikan merupakan hasil jawaban kuesioner tertutup yang akan digunakan untuk analisis statistik.

Dalam penelitian ini, responden yang dipilih adalah individu-individu yang berhubungan dengan penerapan *Good Corporate Governance* dan laporan kinerja keuangan perusahaan.

3.2.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2004: 72), yang dimaksud dengan populasi adalah: “Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan pengertian di atas, populasi dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan pada PDAM Kota dan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data yang ada, jumlah karyawan PDAM Kota dan Kabupaten Cirebon berjumlah 617 orang, sehingga populasi dalam penelitian ini berjumlah 617 orang.

3.2.4.2 Sampel

Sampel, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel digunakan jika populasi yang akan diteliti itu dalam jumlah yang besar, maka untuk menghemat tenaga, waktu dan dana diberlakukanlah sampel. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul mewakili. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan ini didasarkan pada penelitian yang akan diambil yaitu ”Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Informasi Kinerja Keuangan”, maka sampel yang mewakili untuk penelitian tersebut adalah karyawan yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu karyawan pada bagian keuangan, pembayaran dan akuntansi serta bagian satuan pengendalian intern. Berdasarkan data karyawan pada bagian tersebut di PDAM Kota dan Kabupaten Cirebon, jumlah karyawan pada PDAM Kota Cirebon berjumlah 23 orang, sedangkan pada PDAM Kabupaten Cirebon berjumlah 18 orang. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 41 orang.

3.2.5 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004: 31).

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu “**Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Informasi Kinerja Keuangan**”, maka identifikasi variabel independen dan dependen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai variabel bebas (X_1), yaitu variabel yang keadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel lain, bahkan variabel bebas ini merupakan faktor penyebab yang akan memengaruhi variabel terikat.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Informasi kinerja keuangan sebagai variabel terikat (Y), yaitu variabel yang keberadaannya merupakan sesuatu yang dipengaruhi atau dihasilkan oleh variabel bebas.

Jenis pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran ordinal yang digunakan untuk mengukur variabel X dan Y.

Lebih lanjut, operasionalisasi dari kedua variabel penelitian dapat diketahui dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	Item Pertanyaan
<p><i>Good Corporate Governance</i> (X) (Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002)</p>	<i>Transparency</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan informasi 2. Penerapan prosedur akuntansi 	Ordinal	<p>1-3</p> <p>4 & 5</p>
	<i>Accountability</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya sistem pengendalian internal yang efektif. 2. Adanya pengawasan Internal 	Ordinal	<p>6 – 8</p> <p>9 – 10</p>
	<i>Responsibility</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggungjawab ekonomi dan sosial. 2. Tanggungjawab taat pada hukum positif. 3. Tanggungjawab etis, menjalankan hal yang baik, benar dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat 	Ordinal	<p>11</p> <p>12</p> <p>13&14</p>
	<i>Independency</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan perusahaan secara professional 2. Pengambilan keputusan secara objektif. 	Ordinal	<p>15&16</p> <p>17&18</p>
	<i>Fairness</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan hak-hak <i>stakeholders</i> 2. Perlakuan terhadap pemegang saham, karyawan, dan nasabah 	Ordinal	<p>19</p> <p>20&21</p>

Informasi Kinerja Keuangan (Y) (Salam, 2003:90)	Akurat	1. Bebas dari kesalahan 2. Isi informasi jelas 3. Berdasarkan data dan bukti	Ordinal	22 23 24
	Tepat waktu	1. Sesuai dengan target waktu yang ditentukan	Ordinal	25 & 26
	Relevan	1. Isi sesuai dengan ketentuan 2. Menyajikan informasi terbaru 3. Isi informasi sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>	Ordinal	27 28 29
	Nilai Informasi	1. Bermanfaat bagi <i>stakeholder</i> 2. Dapat dipercaya 3. Mudah mendapatkannya	Ordinal	30 31 32

Di dalam tabel di atas terdapat skala ordinal. Indriantoro (1999: 97) menyebutkan bahwa: “Ukuran ordinal adalah ukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan ranking atau peringkat dari objek atau variabel yang diukur.”

Dengan demikian, ukuran ordinal merupakan pengukuran variabel yang digunakan untuk mengukur variabel yang menyatakan kategori, ranking atau peringkat. Untuk mengukur variabel X dan Y digunakan teknik *skala likert*, di mana variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Sugiyono (2004: 76), menyatakan bahwa: “Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial.” *Skala likert* yang digunakan adalah *skala likert* dengan lima angka penilaian, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skor jawaban

Kriteria	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono (2004: 76)

Untuk mengukur hubungan kedua variabel diatas berdasarkan jenis dan skala variabel digunakan analisa korelasi *Pearson*. Dari analisis data yang akan dilakukan akan diketahui hubungan antara kedua variabel yang diteliti dan sampai sejauhmana derajat pengaruhnya.

3.2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Validitas menggambarkan seberapa tepat suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya atau dalam pengertian lain, bagaimana kuesioner dapat benar-benar mengukur apa yang akan diukurnya. Menurut Suliyanto (2006:152) uji instrumen, baik validitas maupun reliabilitas, tidak diujikan pada seluruh responden ketika proses pengambilan data telah selesai, tetapi pada sampel pendahuluan sebanyak minimal 30 orang responden. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan melakukan perbaikan instrumen jika terdapat item yang tidak valid atau variabel yang tidak reliabel.

Valid : nilai $r_{hitung} \geq$ nilai r_{tabel}

Tidak valid : nilai $r_{hitung} <$ nilai r_{tabel}

Nilai r_{tabel} dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, dan $n = 30$ diperoleh

nilai r_{tabel} sebesar 0,361 (Usman dan Akbar, 2006:203).

Dalam menganalisis validitas, penulis menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* karena data yang digunakan merupakan data interval (Suliyanto, 2006:44).

Rumus:

$$r = \frac{n \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{\sqrt{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2} \cdot \sqrt{n \cdot \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana:

r = korelasi validitas

n = jumlah sampel

X = skor total responden

Y = skor total pernyataan masing-masing

Tabel 3.3
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2010:184)

Selain valid, kuesioner juga harus reliabel agar hasil suatu penelitian dapat dipercaya. Untuk mengukur apakah kuesioner tersebut dapat dipercaya (*Reliable*) digunakan uji reliabilitas dengan menggunakan *Alpha Cronbach*.

Rumus:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{(k-1)} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Dimana:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir

σ_t^2 = varian total

Variabel dikatakan reliabel bila memenuhi nilai minimal Alpha 0,7 (untuk Penelitian sosial pada umumnya).

3.2.7 Teknik Pengolahan Data

Sebelum data diolah, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang masuk sehingga dapat diketahui apabila terjadi kesalahan.
2. Tabulasi, yaitu mengubah semua jawaban yang diterima ke dalam bentuk angka sehingga dapat mempermudah analisis data dalam penelitian ini.
3. *Koding*, yaitu mengklasifikasi jawaban responden dalam beberapa kategori. Karena kuesioner ini menggunakan kuesioner tertutup dengan membuat lima gradasi skala *likert* untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang fenomena-fenomena yang ada.

Untuk pengolahan, digunakan tabel untuk mempermudah dalam melihat kumpulan data atau dalam melihat masing-masing variabel. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap informasi kinerja keuangan, digunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang bersifat uraian penjelasan dengan membuat tabel-tabel, mengelompokkan, mengenal isi data berdasarkan pada hasil jawaban kuesioner yang diperoleh dari tanggapan responden dengan menggunakan tabulasi data dan menggunakan analisis kuantitatif, yaitu analisis dengan mengolah data dari hasil yang telah dinyatakan dalam satuan angka untuk dianalisis dengan perhitungan statistik terhadap variabel obyek yang diteliti yaitu statistik berupa uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis. Semua analisis tersebut menggunakan *Microsoft Excel* dan *SPSS 20*.

3.2.7.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat diperkirakan yang tidak bias dan efisiensi maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. (Situmorang *et al* 2008: 55).

Uji Normalitas dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov*. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% maka jika nilai *Asymp.Sig (2 Tailed)* diatas nilai signifikan 5% artinya variable residual berdistribusi normal (Situmorang *et al*, 2008: 62).

2. Uji Heteroskedastisitas

Artinya varians variabel independent adalah konstan (sama) untuk setiap nilai tertentu variabel independent (*homokedastisitas*). Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. *Heteroskedastisitas* diuji dengan *uji Glesjer* dengan pengambilan keputusan jika variabel independent signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitasnya signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah pada heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Artinya variabel independent yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari besarnya *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* melalui program SPSS. *Tolerance* mengukur variabelitas variabel terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Nilai yang dipakai *Tolerance*>0,1, atau nilai *VIF*<5, maka tidak terjadi multikolinieritas (Situmorang et al, 2008: 104).

3.2.7.2 Rancang Pengujian Hipotesis

1. Persamaan Regresi Berganda

Penelitian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006). Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana:

Y = Informasi Kinerja Keuangan

X_1 = *Transparency*

X_2 = *Accountability*

$X3$ = *Responsibility*

$X4$ = *Independency*

$X5$ = *Fairness*

α = Konstan

$\beta1... \beta5$ = Koefisien Regresi

e = Error

Langkah-langkah pengujian hipotesis pada penelitian ini dijabarkan, sebagai berikut:

1. Model Regresi

Pengujian ini untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan layak untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut ini.

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak yaitu apabila $p\ value > 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak untuk digunakan dalam penelitian.
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu apabila $p\ value > 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam penelitian.

2. Pengujian Ketepatan Perkiraan (R^2)

Pengujian ini untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi majemuk (R^2) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel independen. Jika dalam suatu model terdapat lebih dari dua variabel independen, maka lebih baik menggunakan nilai adjusted R^2 .

3. Pengujian Signifikansi Parameter Individual

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Kriteria pengujiannya adalah seperti berikut ini.

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak yaitu apabila $\rho \text{ value} < 0.05$ atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai alpha 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu apabila $\rho \text{ value} > 0.05$ atau bila nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji secara empiris. Yang dimaksud dengan proposisi adalah ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenarannya, mengenai konsep atau *construct* yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena (Indriantoro dan Supomo, 2002). Jadi dapat diartikan bahwa hipotesis merupakan suatu pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk diuji. Rancangan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dimulai dengan menetapkan hipotesis penelitian, menetapkan tingkat signifikansi, memilih tes statistik dan melakukan pengujian tes hasil statistik, menerima atau menolak hipotesis penelitian, yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

3. Penetapan Hipotesis Statistik

Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, Rancangan pengujian hipotesis dimulai dengan penetapan hipotesis nol, pemilihan uji statistik dan perhitungan nilai tes statistik serta penetapan tingkat signifikansi. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon. Dengan demikian hipotesis penelitian secara statistik dapat dirumuskan sebagai berikut:

$H_0: \mu_1 = \mu_2$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$: Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

Adapun penjabaran hipotesisnya sebagai berikut:

a. Hipotesis 1

H_{01} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Transparency* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

H_{11} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Transparency* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

b. Hipotesis 2

H₀₂ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Accountability* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

H₁₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Accountability* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

c. Hipotesis 3

H₀₃ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Responsibility* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

H₁₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Responsibility* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

d. Hipotesis 4

H₀₄ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Independency* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

H₁₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Independency* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

e. Hipotesis 5

H₀₅ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Fairness* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

H₁₅ : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *Fairness* terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

f. Hipotesis 6

H_{06} : Tidak terdapat pengaruh yang penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

H_{16} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan GCG terhadap informasi kinerja keuangan di PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

3.2.7.3 Analisis Korelasi

Analisa korelasi Pearson (*product moment*) menunjukkan kuat lemah hubungan dan arah variabel independen dengan variabel dependen, dimana hubungan dinyatakan oleh tanda (+) dan (-).

Rumus korelasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) \times (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r = Koefisiensi validitasi

n = Banyaknya responden

X = Skor total pertanyaan responden variabel X

Y = Skor total pertanyaan responden variabel Y

$\sum X$ = Jumlah skor dalam variabel X

$\sum Y$ = Jumlah skor dalam variabel Y

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat masing-masing variabel X

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat masing-masing variabel Y

Besarnya koefisiensi korelasi adalah $-1 \leq r \leq 1$.

Apabila (-) : Terdapat hubungan yang negatif atau berlawanan.

Apabila (+) : Terdapat hubungan yang positif atau searah.

Interpretasi dari nilai koefisien korelasi :

- a. Apabila $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali.
- b. Apabila $r = 1$ atau mendekati 1, maka hubungan kedua variabel kuat sekali dengan mempunyai hubungan searah.
- c. Apabila $r = -1$ atau mendekati -1, maka hubungan kedua variabel kuat sekali dan mempunyai hubungan yang terbalik.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan, maka berpedoman pada kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kekuatan Hubungan Antara Variabel X dan Y

$\geq 0,00 \rightarrow < 0,20$	Pengaruh yang sangat kecil dan bisa diabaikan
$\geq 0,20 \rightarrow < 0,40$	Pengaruh yang sangat kecil (tidak erat)
$\geq 0,40 \rightarrow < 0,70$	Pengaruh yang cukup erat
$\geq 0,70 \rightarrow < 0,90$	Pengaruh yang erat (reliabel)
$\geq 0,90 \rightarrow < 1$	Pengaruh yang sangat erat

Sumber : Sugiyono (2009:183)

3.2.7.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel X (*Good Corporate Governance*) terhadap variabel Y (Informasi Kinerja Keuangan). Persentase pengaruh semua variabel bebas atas nilai variabel terikat ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2).

Adapun rumus yang digunakan adalah

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R^2 = Kuadrat koefisien korelasi.

KD = Seberapa jauh perubahan variabel Y dipengaruhi variabel X

3.2.7.5 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang diungkapkan secara deklaratif. Pernyataan atau dugaan diformulasikan dalam bentuk variabel agar bisa diuji secara empiris. Menurut Ety Rohaety, dkk (2007:104) menyatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diterima kecuali bahwa data yang dikumpulkan salah. Hipotesis alternatif akan diterima hanya jika data yang dikumpulkan mendukungnya.

Hipotesis Mayor (Utama) dalam penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta = 0$, *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan

$H_1 : \beta \neq 0$, *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

Uji signifikan terhadap hipotesis tersebut dilakukan dengan pengujian t dengan tingkat signifikan 0.05 dengan menggunakan $dk = n - 2$ dengan rumus sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Keterangan:

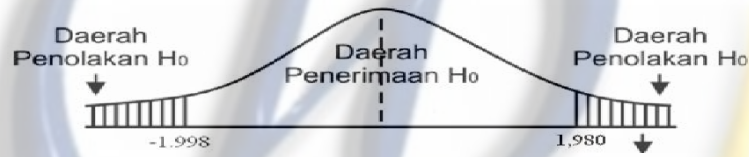
t = koefisien Uji - t

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Kriteria pengujian Uji - t ini memiliki kriteria penelitian sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_a diterima, artinya *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan.



Gambar 3.2
Kurva Uji t

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai hasil pengumpulan data di lapangan, yaitu penyebaran kuesioner terhadap 120 karyawan PDAM di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian akan berupa pemaparan data karakteristik responden, deskripsi jawaban responden atas pertanyaan – pertanyaan kuesioner, pengujian hipotesis, serta pembahasan yaitu analisa hasil penelitian.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data Responden

Pada tabel di bawah ini akan dipaparkan data responden yang merupakan karyawan PDAM pada 4 PDAM :

Tabel 4.1
Wilayah Kerja Dinas PDAM

Wilayah Kerja	Frekuensi	Persentase
Kota Cirebon	23	19,2%
Kabupaten Cirebon	18	15,0%
Kabupaten Sumedang	45	37,5%
Kabupaten Kuningan	34	28,3%
Jumlah	120	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden berasal dari dinas PDAM Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 45 orang atau 37,5%. Sedangkan yang paling sedikit adalah dari dinas PDAM Kabupaten Cirebon yakni sebanyak 18 orang atau 15,0%. Banyaknya jumlah responden dari

PDAM Kabupaten Sumedang karena cakupan wilayah pelayanan yang luas yang membutuhkan jumlah karyawan yang memadai dalam menjalankan tugas.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah Kerja

Kategori	Kota Cirebon		Kabupaten Cirebon		Kabupaten Sumedang		Kabupaten Kuningan		Total
	f	%	f	%	f	%	f	%	
Jenis Kelamin									
Laki-laki	13	10,83	11	9,17	31	25,83	17	14,17	72
Perempuan	10	8,33	7	5,83	14	11,67	17	14,17	48
Usia									
< 30 tahun	2	1,67	1	0,83	15	12,50	10	8,33	28
31 - 35 tahun	2	1,67	3	2,50	10	8,33	4	3,33	19
36 - 40 tahun	5	4,17	8	6,67	5	4,17	8	6,67	26
41 - 45 tahun	6	5,00	5	4,17	9	7,50	3	2,50	23
> 45 tahun	8	6,67	1	0,83	6	5,00	9	7,50	24
Tingkat Pendidikan									
D3	6	5,00	7	5,83	19	15,83	16	13,33	48
S1	17	14,17	10	8,33	25	20,83	16	13,33	68
S2	0	0,00	1	0,83	1	0,83	2	1,67	4
Masa Kerja									
< 5 tahun	7	5,83	2	1,67	7	5,83	5	4,17	21
5 - 10 tahun	6	5,00	6	5,00	16	13,33	11	9,17	39
> 10 - 15 tahun	3	2,50	6	5,00	9	7,50	4	3,33	22
> 15 tahun	7	5,83	4	3,33	13	10,83	14	11,67	38

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan mayoritas jenis kelamin responden pada 4 PDAM adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu 72 orang (60%), dengan jumlah karyawan laki-laki terbanyak menempati wilayah kerja Kabupaten Kuningan yakni sebanyak 17 orang atau 14,17%. Sedangkan mayoritas jenis kelamin perempuan menempati wilayah kerja Kabupaten Kuningan yakni sebanyak 17 orang atau 14,17%.

Berdasarkan aspek usia, mayoritas usia responden adalah kurang dari 30 tahun sebanyak 28 orang (23,33%), dimana jumlah karyawan yang berusia di bawah 30 tahun terbanyak menempati wilayah kerja Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 15 orang atau 12,50%. Usia responden 31 - 35 tahun paling banyak menempati wilayah kerja Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 10 orang atau 8,33%, usia responden 36 - 40 tahun paling banyak ditempati wilayah kerja Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan yakni masing-masing sebanyak 8 orang atau 6,67%, usia responden 41 - 45 tahun menempati wilayah kerja Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 9 orang atau 7,50%. Sedangkan usia responden lebih dari 45 tahun paling banyak berasal dari wilayah kerja Kabupaten Kuningan yakni sebanyak 9 orang atau 7,50%.

Berdasarkan aspek pendidikan, mayoritas pendidikan responden adalah berada pada jenjang S1. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan yang cukup. Responden yang berlatar pendidikan jenjang D3 paling banyak berasal dari wilayah kerja Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 19 orang atau 15,83%. Responden yang berlatar pendidikan S1 paling banyak berasal dari wilayah kerja Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 25 orang atau 20,83%. Mayoritas pendidikan responden S2 menempati wilayah kerja Kabupaten Kuningan yakni sebanyak 2 orang atau 1,67%.

Berdasarkan aspek masa kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja 5 hingga 10 tahun yaitu sebanyak 39 orang (32,5%). Hal tersebut menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman kerja yang cukup di PDAM. Mayoritas masa kerja responden < 5 tahun menempati wilayah kerja Kota Cirebon dan

Kabupaten Sumedang yakni masing-masing sebanyak 7 orang atau 5,83%. Mayoritas masa kerja responden 5 – 10 tahun menempati wilayah kerja Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 16 orang atau 13,33%. Mayoritas masa kerja responden lebih dari 10 – 15 tahun menempati wilayah kerja Kabupaten Sumedang yakni sebanyak 9 orang atau 7,50%. Mayoritas masa kerja responden lebih dari 15 tahun menempati wilayah kerja Kabupaten Kuningan yakni sebanyak 14 orang atau 11,67%.

4.1.2 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Penerapan Prinsip GCG (X), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG (X)

Variabel X		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Transparency	1	42	70	3	5	0	509	84,83
	2	67	47	4	1	1	538	89,67
	3	53	61	4	0	2	523	87,17
	4	59	56	3	0	2	530	88,33
	5	46	50	2	0	22	458	76,33
Rata-rata Skor dan Persentase							512	85,27
02. Accountability	6	48	69	2	0	1	523	87,17
	7	46	67	5	0	2	515	85,83
	8	25	72	5	16	2	462	77,00
	9	22	87	5	6	0	485	80,83
	10	18	96	4	1	1	489	81,50
	11	54	63	2	1	0	530	88,33
Rata-rata Skor dan Persentase							501	83,44
03. Responsibility	12	50	62	3	3	2	515	85,83
	13	47	68	4	0	1	520	86,67
	14	37	76	3	3	1	505	84,17
	15	57	55	4	3	1	524	87,33

Rata-rata Skor dan Persentase							516	86,00
04. <i>Independency</i>	16	42	73	4	0	1	515	85,83
	17	23	65	8	2	22	425	70,83
	18	60	56	2	0	2	532	88,67
	19	54	64	1	0	1	530	88,33
Rata-rata Skor dan Persentase							501	83,42
05. <i>Fairness</i>	20	27	72	3	16	2	466	77,67
	21	40	74	5	1	0	513	85,50
	22	58	57	3	1	1	530	88,33
Rata-rata Skor dan Persentase							503	83,83
Rata-rata Skor Total							2532	84,39
Kriteria							Sangat Baik	

Untuk mengkatagorikan bagaimana gambaran mengenai Penerapan Prinsip GCG (X), maka penulis membuat pengkatagorian dalam garis interval sebagai berikut :

Jarak interval untuk 120 orang responden

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 1 \times 120 \\
 &= 120
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 5 \times 120 \\
 &= 600
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Minimum} &= (\text{Skor Minimum} / \text{Skor Maksimum}) \times 100\% \\
 &= (120 / 600) \times 100\% \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Maksimum} &= (\text{Skor Maksimum} / \text{Skor Maksimum}) \times 100\% \\
 &= (600 / 600) \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Selisih} &= \text{Persentase Maksimum} - \text{Persentase Minimum} \\
 &= 100\% - 20\% \\
 &= 80\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Jarak Interval} &= \text{Interval} : \text{Jenjang} (5) \\
 &= 80\% : 5 \\
 &= 16\%
 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 16% pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut :

Gambar 4.1
Garis Kontinum



Berpedoman garis kontinum yang disajikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG (X) diperoleh nilai sebesar 84,39% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (X) adalah sangat baik.

Penerapan prinsip GCG yang baik ini karena prinsip *Good Corporate Governance* dalam Badan Usaha Milik Daerah merupakan suatu hal yang diwajibkan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN No.117/M-BU/2002 untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada perusahaan-perusahaan milik negara. Hal tersebut berimplikasi pada penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMD, termasuk PDAM. Penerapan GCG pada PDAM sendiri telah dimulai sejak tahun 2002 yang dilaksanakan oleh Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh

Indonesia). Pada penerapannya masih ditemui sejumlah kendala pada beberapa PDAM. PDAM yang berada di wilayah Jawa Barat sejak awal (tahun 2002) telah melaksanakan, sehingga pada beberapa PDAM di wilayah Jawa Barat telah berjalan dengan baik.

4.1.2.1 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon (X), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon (X)

Variabel X		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Transparency	1	14	9	0	0	0	106	92,17
	2	17	6	0	0	0	109	94,78
	3	16	5	1	0	1	104	90,43
	4	16	5	1	0	1	104	90,43
	5	6	6	0	0	11	65	56,52
Rata-rata Skor dan Persentase							98	84,87
02. Accountability	6	15	8	0	0	0	107	93,04
	7	16	5	1	0	1	104	90,43
	8	11	5	1	6	0	90	78,26
	9	6	10	1	6	0	85	73,91
	10	6	15	1	0	1	94	81,74
	11	15	6	1	1	0	104	90,43
Rata-rata Skor dan Persentase							97	84,64
03. Responsibility	12	15	6	0	1	1	102	88,70
	13	16	6	1	0	0	107	93,04
	14	6	16	0	0	1	95	82,61
	15	13	9	0	1	0	103	89,57
Rata-rata Skor dan Persentase							102	88,48
04. Independency	16	15	6	1	0	1	103	89,57
	17	6	7	0	1	9	69	60,00
	18	16	6	0	0	1	105	91,30

	19	15	7	0	0	1	104	90,43
Rata-rata Skor dan Persentase							95	82,83
05. Fairness	20	7	7	0	9	0	81	70,43
	21	14	7	1	1	0	103	89,57
	22	15	7	1	0	0	106	92,17
Rata-rata Skor dan Persentase							97	84,06
Rata-rata Skor Total							489	84,97
Kriteria								Sangat Baik

Berpedoman garis kontinum yang diasjikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon (X) diperoleh nilai sebesar 84,97% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon (X) adalah sangat baik.

4.1.2.2 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di Kabupaten Cirebon

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Cirebon (X), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.5

Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Cirebon

Variabel X		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Transparency	1	13	5	0	0	0	85	94,44
	2	13	5	0	0	0	85	94,44
	3	14	4	0	0	0	86	95,56
	4	14	4	0	0	0	86	95,56
	5	3	4	0	0	11	42	46,67
Rata-rata Skor dan Persentase							77	85,33
02. Accountability	6	13	5	0	0	0	85	94,44
	7	13	5	0	0	0	85	94,44

	8	2	5	0	10	1	51	56,67
	9	3	15	0	0	0	75	83,33
	10	2	16	0	0	0	74	82,22
	11	13	5	0	0	0	85	94,44
Rata-rata Skor dan Persentase							76	84,26
03. Responsibility	12	13	5	0	0	0	85	94,44
	13	14	4	0	0	0	86	95,56
	14	2	15	0	1	0	72	80,00
	15	13	5	0	0	0	85	94,44
Rata-rata Skor dan Persentase							82	91,11
04. Independency	16	13	5	0	0	0	85	94,44
	17	2	5	0	0	11	41	45,56
	18	14	4	0	0	0	86	95,56
	19	14	4	0	0	0	86	95,56
Rata-rata Skor dan Persentase							75	82,78
05. Fairness	20	2	8	0	7	1	57	63,33
	21	13	5	0	0	0	85	94,44
	22	14	4	0	0	0	86	95,56
Rata-rata Skor dan Persentase							76	84,44
Rata-rata Skor Total							385	85,59
Kriteria								Sangat Baik

Berpedoman garis kontinum yang disajikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Cirebon (X) diperoleh nilai sebesar 85,59% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Cirebon (X) adalah sangat baik.

4.1.2.3 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di Kabupaten Sumedang

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Sumedang (X), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.6

Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Sumedang

Variabel X		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Transparency	1	10	28	3	4	0	179	79,56
	2	17	23	3	1	1	189	84,00
	3	17	25	2	0	1	192	85,33
	4	17	25	2	0	1	192	85,33
	5	18	25	2	0	0	196	87,11
Rata-rata Skor dan Persentase							190	84,27
02. Accountability	6	14	29	1	0	1	190	84,44
	7	13	29	2	0	1	188	83,56
	8	7	34	3	0	1	181	80,44
	9	9	34	2	0	0	187	83,11
	10	8	34	3	0	0	185	82,22
	11	17	27	1	0	0	196	87,11
Rata-rata Skor dan Persentase							188	83,48
03. Responsibility	12	13	29	2	0	1	188	83,56
	13	8	34	2	0	1	183	81,33
	14	12	29	2	2	0	186	82,67
	15	17	24	3	0	1	191	84,89
Rata-rata Skor dan Persentase							187	83,11
04. Independency	16	10	33	2	0	0	188	83,56
	17	11	27	6	1	0	183	81,33
	18	20	24	1	0	0	199	88,44
	19	17	27	1	0	0	196	87,11
Rata-rata Skor dan Persentase							192	85,11
05. Fairness	20	11	31	3	0	0	188	83,56
	21	7	34	4	0	0	183	81,33
	22	20	22	2	1	0	196	87,11
Rata-rata Skor dan Persentase							189	84,00
Rata-rata Skor Total							945	83,99
Kriteria								Baik

Berpedoman garis kontinum yang diasajikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Sumedang (X) diperoleh nilai sebesar 83,99% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan

pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Sumedang (X) adalah baik.

4.1.2.4 Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di Kabupaten Kuningan

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Kuningan (X), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.7
Gambaran Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Kuningan

Variabel X		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Transparency	1	5	28	0	1	0	139	81,76
	2	20	13	1	0	0	155	91,18
	3	6	27	1	0	0	141	82,94
	4	12	22	0	0	0	148	87,06
	5	19	15	0	0	0	155	91,18
Rata-rata Skor dan Persentase							148	86,82
02. Accountability	6	6	27	1	0	0	141	82,94
	7	4	28	2	0	0	138	81,18
	8	5	28	1	0	0	140	82,35
	9	4	28	2	0	0	138	81,18
	10	2	31	0	1	0	136	80,00
	11	9	25	0	0	0	145	85,29
Rata-rata Skor dan Persentase							140	82,16
03. Responsibility	12	9	22	1	2	0	140	82,35
	13	9	24	1	0	0	144	84,71
	14	17	16	1	0	0	152	89,41
	15	14	17	1	2	0	145	85,29
Rata-rata Skor dan Persentase							145	85,44
04. Independency	16	4	29	1	0	0	139	81,76
	17	4	26	2	0	2	132	77,65
	18	10	22	1	0	1	142	83,53

	19	8	26	0	0	0	144	84,71
Rata-rata Skor dan Persentase							139	81,91
05. Fairness	20	7	26	0	0	1	140	82,35
	21	6	28	0	0	0	142	83,53
	22	9	24	0	0	1	142	83,53
Rata-rata Skor dan Persentase							141	83,14
Rata-rata Skor Total							713	83,89
Kriteria								Baik

Berpedoman garis kontinum yang diasjikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Kuningan (X) diperoleh nilai sebesar 83,89% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kabupaten Kuningan (X) adalah baik.

4.1.2.5 Rekapitulasi Mengenai Penerapan Prinsip GCG di PDAM Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan

Untuk mengetahui gambaran mengenai Penerapan Prinsip GCG untuk masing-masing wilayah kerja penulis mencoba menjabarkan ke dalam tabel rekapitulasi berikut.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Penerapan prinsip GCG

Wilayah Kerja	Skor Total	Persentase
Kota Cirebon		
<i>Transparency</i>	98	84,87
<i>Accountability</i>	97	84,64
<i>Responsibility</i>	102	88,48
<i>Independency</i>	95	82,83

<i>Fairness</i>	97	84,06
Rata-rata Skor	489	84,97
Kabupaten Cirebon		
<i>Transparency</i>	77	85,33
<i>Accountability</i>	76	84,26
<i>Responsibility</i>	82	91,11
<i>Independency</i>	75	82,78
<i>Fairness</i>	76	84,44
Rata-rata Skor	385	85,59
Kabupaten Sumedang		
<i>Transparency</i>	190	84,27
<i>Accountability</i>	188	83,48
<i>Responsibility</i>	187	83,11
<i>Independency</i>	192	85,11
<i>Fairness</i>	189	84,00
Rata-rata Skor	945	83,99
Kabupaten Kuningan		
<i>Transparency</i>	148	86,82
<i>Accountability</i>	140	82,16
<i>Responsibility</i>	145	85,44
<i>Independency</i>	139	81,91
<i>Fairness</i>	141	83,14
Rata-rata Skor	713	83,89

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai persentase tertinggi pertama ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Cirebon, yakni sebesar 85,59% dengan klasifikasi kategori sangat baik. Persentase tertinggi kedua ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kota Cirebon, yakni sebesar 84,97% dengan klasifikasi kategori baik. Persentase tertinggi ketiga ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Sumedang, yakni sebesar 83,99% dengan klasifikasi kategori baik. Sedangkan persentase terendah ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Kuningan, yakni sebesar 83,89% dengan klasifikasi kategori baik.

4.1.3 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Informasi Kinerja Keuangan (Y) pada 4 PDAM yang menjadi lokasi penelitian, maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut :

Tabel 4.9
Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan (Y)

Variabel Y		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Akurat	21	48	67	2	3	0	520	86,67
	22	58	57	2	2	1	529	88,17
	23	52	63	2	3	0	524	87,33
Rata-rata Skor dan Persentase							524	87,39
02. Tepat Waktu	24	47	70	2	1	0	523	87,17
	25	41	77	2	0	0	519	86,50
Rata-rata Skor dan Persentase							521	86,83
03. Relevan	26	46	71	3	0	0	523	87,17
	27	46	68	4	2	0	518	86,33
	28	57	59	4	0	0	533	88,83
Rata-rata Skor dan Persentase							525	87,44
04. Nilai Informasi	29	60	56	4	0	0	536	89,33
	30	52	66	2	0	0	530	88,33
	31	42	73	5	0	0	517	86,17
Rata-rata Skor dan Persentase							528	87,94
Rata-rata Skor Total							2098	87,40
Kriteria								Sangat Baik

Untuk mengkatagorikan bagaimana gambaran mengenai Informasi Kinerja Keuangan (Y), maka penulis membuat pengkatagorian dalam garis interval sebagai berikut:

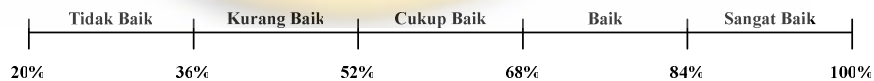
Jarak interval untuk 120 orang responden

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Minimum} &= \text{Skor Minimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 1 \times 120 \\
 &= 120
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Skor Maksimum} &= \text{Skor Maksimum} \times \text{Jumlah Responden} \\
 &= 5 \times 120 \\
 &= 600 \\
 \text{Persentase Minimum} &= (\text{Skor Minimum} / \text{Skor Maksimum}) \times 100\% \\
 &= (120 / 600) \times 100\% \\
 &= 20\% \\
 \text{Persentase Maksimum} &= (\text{Skor Maksimum} / \text{Skor Maksimum}) \times 100\% \\
 &= (600 / 600) \times 100\% \\
 &= 100\% \\
 \text{Selisih} &= \text{Persentase Maksimum} - \text{Persentase Minimum} \\
 &= 100\% - 20\% \\
 &= 80\% \\
 \text{Jarak Interval} &= \text{Interval} : \text{Jenjang} (5) \\
 &= 80\% : 5 \\
 &= 16\%
 \end{aligned}$$

Dengan jarak interval sebesar 16% pada masing-masing kategori, maka dapat digambarkan pembagian skor total dalam bentuk garis kontinum sebagai berikut:

Gambar 4.2
Garis Kontinum



Berpedoman garis kontinum yang disajikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan (Y) diperoleh nilai sebesar 87,40% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat

diartikan bahwa tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan (Y) adalah sangat baik.

4.1.3.1 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon (Y), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.10
Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon (Y)

Variabel Y		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Akurat	21	14	7	1	1	0	103	89,57
	22	14	8	0	0	1	103	89,57
	23	14	7	1	1	0	103	89,57
Rata-rata Skor dan Persentase							103	89,57
02. Tepat Waktu	24	13	9	0	1	0	103	89,57
	25	13	9	1	0	0	104	90,43
Rata-rata Skor dan Persentase							104	90,00
03. Relevan	26	13	8	2	0	0	103	89,57
	27	13	8	2	0	0	103	89,57
	28	14	8	1	0	0	105	91,30
Rata-rata Skor dan Persentase							104	90,14
04. Nilai Informasi	29	13	9	1	0	0	104	90,43
	30	15	7	1	0	0	106	92,17
	31	13	8	2	0	0	103	89,57
Rata-rata Skor dan Persentase							104	90,72
Rata-rata Skor Total							415	90,11
Kriteria							Sangat Baik	

Berpedoman garis kontinum yang diasjikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon (Y) diperoleh nilai sebesar 90,11% dan dalam pengklasifikasian

persentase skor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon (Y) adalah sangat baik.

4.1.3.2 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di Kabupaten Cirebon

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Cirebon (Y), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.11
Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Cirebon

Variabel Y		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Akurat	21	13	5	0	0	0	85	94,44
	22	13	5	0	0	0	85	94,44
	23	13	5	0	0	0	85	94,44
Rata-rata Skor dan Persentase							85	94,44
02. Tepat Waktu	24	13	5	0	0	0	85	94,44
	25	13	5	0	0	0	85	94,44
Rata-rata Skor dan Persentase							85	94,44
03. Relevan	26	14	4	0	0	0	86	95,56
	27	13	5	0	0	0	85	94,44
	28	13	5	0	0	0	85	94,44
Rata-rata Skor dan Persentase							85	94,81
04. Nilai Informasi	29	14	4	0	0	0	86	95,56
	30	14	4	0	0	0	86	95,56
	31	13	5	0	0	0	85	94,44
Rata-rata Skor dan Persentase							86	95,19
Rata-rata Skor Total							341	94,72
Kriteria								Sangat Baik

Berpedoman garis kontinum yang diasjikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM

Kabupaten Cirebon (Y) diperoleh nilai sebesar 94,72% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Cirebon (Y) adalah sangat baik.

4.1.3.3 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di Kabupaten Sumedang

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Sumedang (Y), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.12
Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Sumedang

Variabel Y		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Akurat	21	8	36	1	0	0	187	83,11
	22	16	27	2	0	0	194	86,22
	23	12	32	1	0	0	191	84,89
Rata-rata Skor dan Persentase							191	84,74
02. Tepat Waktu	24	13	31	1	0	0	192	85,33
	25	9	35	1	0	0	188	83,56
Rata-rata Skor dan Persentase							190	84,44
03. Relevan	26	9	35	1	0	0	188	83,56
	27	7	36	2	0	0	185	82,22
	28	10	32	3	0	0	187	83,11
Rata-rata Skor dan Persentase							187	82,96
04. Nilai Informasi	29	12	30	3	0	0	189	84,00
	30	11	33	1	0	0	190	84,44
	31	9	33	3	0	0	186	82,67
Rata-rata Skor dan Persentase							188	83,70
Rata-rata Skor Total							756	83,96
Kriteria								Baik

Berpedoman garis kontinum yang diasjikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Sumedang (Y) diperoleh nilai sebesar 83,96% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Sumedang (Y) adalah baik.

4.1.3.4 Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di Kab. Kuningan

Untuk mengetahui bagaimana gambaran mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Kuningan (Y), maka penulis menyajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 4.13
Gambaran Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Kuningan

Variabel Y		Frekuensi					Skor Total	% Skor Total
Indikator	No	5	4	3	2	1		
01. Akurat	21	13	19	0	2	0	145	85,29
	22	15	17	0	2	0	147	86,47
	23	13	19	0	2	0	145	85,29
Rata-rata Skor dan Persentase							146	85,69
02. Tepat Waktu	24	8	25	1	0	0	143	84,12
	25	6	28	0	0	0	142	83,53
Rata-rata Skor dan Persentase							143	83,82
03. Relevan	26	10	24	0	0	0	146	85,88
	27	13	19	0	2	0	145	85,29
	28	20	14	0	0	0	156	91,76
Rata-rata Skor dan Persentase							149	87,65
04. Nilai Informasi	29	21	13	0	0	0	157	92,35
	30	12	22	0	0	0	148	87,06
	31	7	27	0	0	0	143	84,12
Rata-rata Skor dan Persentase							149	87,84
Rata-rata Skor Total							587	86,25
Kriteria							Sangat Baik	

Berpedoman garis kontinum yang diasjikan pada gambar 4.1, persentase skor tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Kuningan (Y) diperoleh nilai sebesar 86,25% dan dalam pengklasifikasian persentase skor tersebut termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan pengklasifikasian ini, maka dapat diartikan bahwa tanggapan responden tentang Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kabupaten Kuningan (Y) adalah baik.

4.1.3.5 Rekapitulasi Mengenai Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan

Untuk mengetahui gambaran mengenai Informasi Kinerja Keuangan untuk masing-masing wilayah kerja penulis mencoba menjabarkan ke dalam tabel rekapitulasi berikut :

Tabel 4.14
Rekapitulasi Informasi Kinerja Keuangan

Wilayah Kerja	Skor Total	Persentase
Kota Cirebon		
Akurat	103	89,57
Tepat waktu	104	90,00
Relevan	104	90,14
Nilai Informasi	104	90,72
Rata-rata Skor	415	90,11
Kabupaten Cirebon		
Akurat	85	94,44
Tepat waktu	85	94,44
Relevan	85	94,81
Nilai Informasi	86	95,19
Rata-rata Skor	341	94,72
Kabupaten Sumedang		

Akurat	191	84,74
Tepat waktu	190	84,44
Relevan	187	82,96
Nilai Informasi	188	83,70
Rata-rata Skor	756	83,96
Kabupaten Kuningan		
Akurat	146	85,69
Tepat waktu	143	83,82
Relevan	149	87,65
Nilai Informasi	149	87,84
Rata-rata Skor	587	86,25

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai persentase tertinggi pertama ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Cirebon, yakni sebesar 94,72% dengan klasifikasi kategori sangat baik. Persentase tertinggi kedua ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kota Cirebon, yakni sebesar 90,11% dengan klasifikasi kategori baik. Persentase tertinggi ketiga ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Kuningan, yakni sebesar 86,25% dengan klasifikasi kategori baik. Sedangkan persentase terendah ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Sumedang, yakni sebesar 83,96% dengan klasifikasi kategori baik.

4.2 Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk dapat mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi secara normal. Model regresi yang baik adalah data yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini,

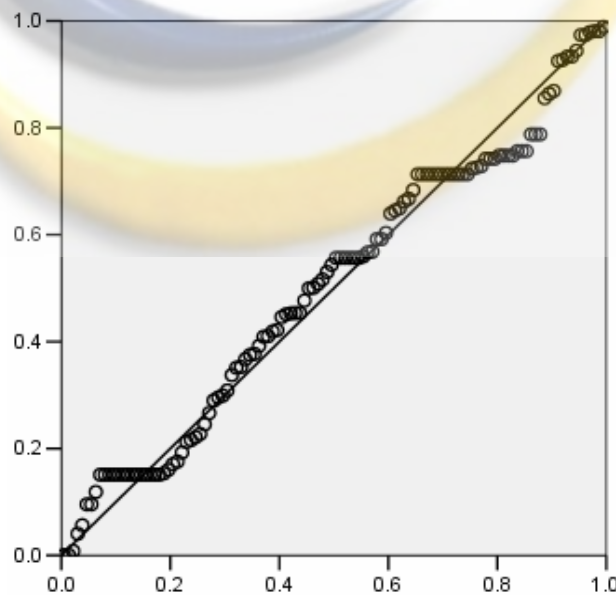
untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan analisis grafik *normal probability plot* (Ghozali, 2011).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut uji hasil uji normalitas dengan menggunakan bantuan *software SPSS 18.0 for window*.

Gambar 4.3
Uji normalitas dengan menggunakan metode scatter plot



Sumber : Pengolahan Data Menggunakan SPSS 18.0

Berdasarkan grafik *normal probability plot* di atas, dapat diketahui bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan bahwa pola berdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

B. Uji Autokorelasi

Menurut **Ghozali (2011)** uji autokorelasi Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier berganda terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Tabel 4.15
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,917 ^a	,841	,834	2,14771	2,118

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Hasil perhitungan statistik *Durbin Watson (DW)* untuk model regresi sebesar 1,848 Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 80, serta k atau jumlah variabel independen = 1 diperoleh dinilai dl sebesar 1,611 dan du sebesar 1,662 (nilai di dapat dari tabel *Durbin Watson*). Maka keputusan Durbin yang diambil ($1,662 < 1,848 < 2,338$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

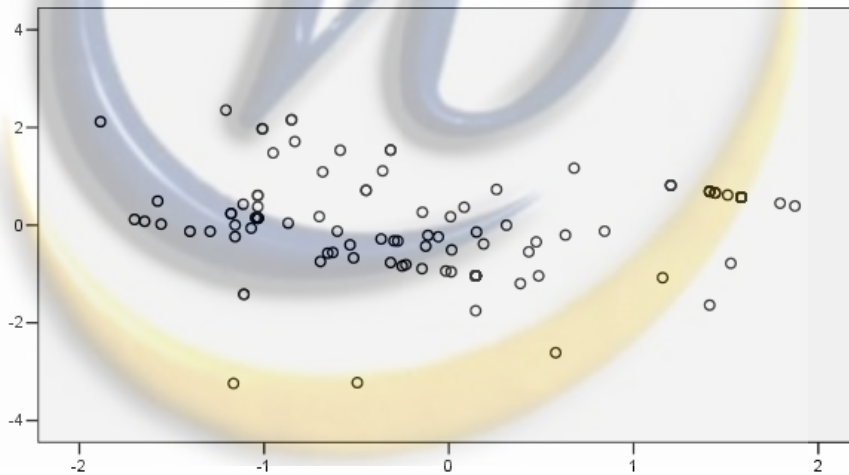
A. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lainnya. Model regresi yang baik jika data tidak terjadi heteroskedastisitas atau memiliki variance yang sama. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan scatterplot. Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas adalah (Ghozali, 2011):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut hasil pengujian uji heteroskedastisitas menggunakan SPSS 18.0 *for windows*.



Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas, tidak terlihat adanya pola tertentu serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

B. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas/independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya nilai *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi yang tidak terdapat multikolinieritas apabila nilai VIF < 10.

Tabel 4.16
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	,215	4,658
	X2	,145	6,877
	X3	,187	5,349
	X4	,170	5,880
	X5	,209	4,790

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Pengolahan Data menggunakan SPSS 20.0

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel adalah kurang 10. Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

4.2.2 Analisis Regresi Untuk Data Keseluruhan

A. Persamaan Regresi

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antar Pengaruh *Transparency* (X_1), *Accountability* (X_2), *Responsibility* (X_3), *Responsibility* (X_4), dan *Responsibility* (X_5) terhadap Informasi Kinerja Keuangan

(Y). Tujuannya adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai variabel dependen dalam hubungannya dengan nilai variabel lain. Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Dimana:

Y = Informasi Kinerja Keuangan

X₁ = *Transparency*

X₂ = *Accountability*

X₃ = *Responsibility*

X₄ = *Independency*

X₅ = *Fairness*

b₀ = intersep

b₁, b₂, ..., b₅ = koefisien regresi

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan program statistik yaitu program SPSS versi 18 maka diperoleh hasil yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini

Tabel 4.16
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32,580	,807		40,381	,000
	X1	,158	,076	,169	2,095	,038
	X2	,206	,103	,196	2,000	,048
	X3	,283	,110	,221	2,561	,012
	X4	,280	,116	,219	2,414	,017
	X5	,292	,135	,177	2,164	,033

a. Dependent Variable: Y

Dari *output* di atas diketahui nilai konstanta dan koefisien regresi sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 32,580 + 0,158 X_1 + 0,206 X_2 + 0,283 X_3 + 0,280 X_4 + 0,292 X_5$$

Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

$b_0 = 32,580$ artinya jika variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 dan X_5 bernilai nol (0), maka variabel Y akan bernilai 32,580 satuan.

$b_1 = 0,158$ artinya jika *Transparency* (X_1) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,158 satuan.

$b_2 = 0,206$ artinya jika *Accountability* (X_2) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,206 satuan.

$b_3 = 0,283$ artinya jika *Responsibility* (X_3) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,283 satuan.

$b_4 = 0,280$ artinya jika *Responsibility* (X_4) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,280 satuan.

$b_5 = 0,292$ artinya jika *Responsibility* (X_5) meningkat sebesar satu satuan dan variabel lainnya konstan, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,292 satuan.

B. Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara *Transparency* (X_1), *Accountability* (X_2), *Responsibility* (X_3), *Responsibility*

(X₄), dan *Responsibility* (X₅) dengan Informasi Kinerja Keuangan (Y) secara bersamaan. Berdasarkan perumusan yang telah disajikan pada Bab III, maka perhitungan koefisien korelasi berganda dari output SPSS yang diperoleh nilai hubungan untuk kedua variabel bebas dengan variabel terikat disajikan pada tabel berikut:

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,917 ^a	,841	,834	2,14771

a. Predictors: (Constant), X₅, X₁, X₄, X₃, X₂

Berdasarkan output SPSS diatas didapat nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,917. Berdasarkan kriteria koefisien korelasi yang dikemukakan Sugiono (2002:183), nilai sebesar 0,488 termasuk kedalam korelasi yang kuat yaitu berada diantara 0,800 - 1,000.

C. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinasi dalam regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Regresi dengan lebih dari dua variabel independen atau bebas digunakan R^2 sebagai koefisien determinasi.

1. Uji Simultan

Besar pengaruh *Transparency* (X₁), *Accountability* (X₂), *Responsibility* (X₃), *Responsibility* (X₄), dan *Responsibility* (X₅) terhadap Informasi Kinerja

Keuangan (Y) secara simultan dapat dinyatakan oleh Koefisien Deterimasi (KD atau R^2) simultan yang disajikan pada output SPSS berikut ini:

Tabel 4.17

Analisis Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,917 ^a	,841	,834	2,14771

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

Berdasarkan output di atas diperoleh nilai R^2 (R square) sebesar 0,841 atau 84,1%. Dengan demikian maka *Transparency* (X_1), *Accountability* (X_2), *Responsibility* (X_3), *Responsibility* (X_4), dan *Responsibility* (X_5) memberikan pengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Y) secara simultan sebesar 84,1%. Sedangkan sisanya 15,9% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

2. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui keberartian hubungan atau pengaruh salah satu variabel bebas dengan tidak bebas dengan asumsi variabel lainnya konstan. Besarnya pengaruh secara parsial dapat dicari dengan mengalikan nilai *zero order correlation* dengan koefisien *beta*. Berikut hasil output SPSS yang diperoleh:

Tabel 4.18
Analisis Koefisien Determinasi Parsial (Uji t)

Coefficients ^a									
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	32,580	,807		40,381	,000			
	X1	,158	,076	,169	2,095	,038	,835	,193	,078
	X2	,206	,103	,196	2,000	,048	,871	,184	,075
	X3	,283	,110	,221	2,561	,012	,862	,233	,096
	X4	,280	,116	,219	2,414	,017	,861	,220	,090
	X5	,292	,135	,177	2,164	,033	,844	,199	,081

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan output di atas terlihat masing-masing nilai dari *Beta* dan *Zero Order Correlation*. Dari nilai-nilai di atas dapat dihitung koefisien determinasi parsial sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{KD Parsial } X_1 &= 0,169 \times 0,835 = 0,141 \text{ atau } 14,11\% \\
 \text{KD Parsial } X_2 &= 0,196 \times 0,871 = 0,171 \text{ atau } 17,09\% \\
 \text{KD Parsial } X_3 &= 0,221 \times 0,862 = 0,191 \text{ atau } 19,08\% \\
 \text{KD Parsial } X_4 &= 0,219 \times 0,861 = 0,188 \text{ atau } 18,85\% \\
 \text{KD Parsial } X_5 &= 0,177 \times 0,844 = 0,149 \text{ atau } 14,94\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas terlihat bahwa variabel *Responsibility* (X_3) memiliki pengaruh paling besar yakni 19,08%. Sedangkan variabel *Transparency* (X_1) memiliki pengaruh paling kecil yakni sebesar 14,11%.

D. Pengujian Hipotesis

Pada pembahasan ini akan dijelaskan bagaimana pengaruh secara dari masing-masing variabel *Transparency* (X_1), *Accountability* (X_2), *Responsibility* (X_3), *Responsibility* (X_4), dan *Responsibility* (X_5) terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Y) baik secara simultan atau parsial. Pembahasan ini dilakukan berdasarkan hasil regresi yang ditunjukkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 18

1. Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah variabel *Transparency* (X_1), *Accountability* (X_2), *Responsibility* (X_3), *Responsibility* (X_4), dan *Responsibility* (X_5) mempunyai pengaruh terhadap variabel Informasi Kinerja Keuangan (Y) secara keseluruhan, maka penulis akan mengujinya dengan penggunaan statistik Uji F dengan hipotesis sebagai berikut:

H_o : $b_1, b_2, = 0$, berarti antara *Transparency* (X_1), *Accountability* (X_2), *Responsibility* (X_3), *Responsibility* (X_4), dan *Responsibility* (X_5) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Y)

H_a : $b_1, b_2, \neq 0$, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara *Transparency* (X_1), *Accountability* (X_2), *Responsibility* (X_3), *Responsibility* (X_4), dan *Responsibility* (X_5) terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Y)

Dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis Uji F adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{JK_{Regresi} / k}{JK_{(Residu)} / \{n - (k + 1)\}}$$

Dimana :

JK_{residu} = Koefisien Korelasi Ganda

K = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah anggota sampel

$$F_{hitung} = \frac{1550,801/5}{4972,341/\{120 - (5 + 1)\}} = 7,111$$

Ketentuan sebagai berikut:

- Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ maka H_0 ditolak (signifikan)
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Dimana $F_{tabel} = F_{(0,05; 5; 114)} = 2,294$

Dari hasil perhitungan diatas jika dilakukan dengan menggunakan software SPSS, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2774,524	5	554,905	120,300	,000 ^a
	Residual	525,843	114	4,613		
	Total	3300,367	119			

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan output di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 120,300 dengan p-value (sig) 0,000. Dengan $\alpha=0,05$, $df_1=5$, dan $df_2= 114$ ($n-k-1$), maka di dapat F tabel 2,294. Dikarenakan nilai F hitung $>$ F tabel ($120,300 > 2,294$) maka H_0 ditolak. Dengan cara melihat p-value, dari output di atas diperoleh nilai p-value sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas secara simultan mempengaruhi Informasi Kinerja Keuangan (Y) secara signifikan.

2. Uji Parsial

Untuk melihat lebih lanjut variabel mana saja yang memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel Y, berikut akan disajikan uji hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t.

Tabel 4.20
Uji Hipotesis Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32,580	,807		40,381	,000
	X1	,158	,076	,169	2,095	,038
	X2	,206	,103	,196	2,000	,048
	X3	,283	,110	,221	2,561	,012
	X4	,280	,116	,219	2,414	,017
	X5	,292	,135	,177	2,164	,033

a. Dependent Variable: Y

Untuk variabel X₁ diperoleh $t_{hitung} = 2,095 > t_{tabel} = 1,980$ maka Ho ditolak

Untuk variabel X₂ diperoleh $t_{hitung} = 2,000 > t_{tabel} = 1,980$ maka Ho ditolak

Untuk variabel X₃ diperoleh $t_{hitung} = 2,561 > t_{tabel} = 1,980$ maka Ho ditolak

Untuk variabel X₄ diperoleh $t_{hitung} = 2,414 > t_{tabel} = 1,980$ maka Ho ditolak

Untuk variabel X₅ diperoleh $t_{hitung} = 2,164 > t_{tabel} = 1,980$ maka Ho ditolak

Dari uji hipotesis individu diatas dengan statistik uji t, maka kita mempercayai 95% bahwa variabel *Transparency* (X₁), *Accountability* (X₂), *Responsibility* (X₃), *Responsibility* (X₄), dan *Responsibility* (X₅) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Y) dikarenakan nilai t_{hitung} variabel tersebut lebih besar dari nilai t_{tabel} .

4.2.3 Analisis Regresi Untuk Data Kota Cirebon

A. Persamaan Regresi

Penggunaan analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk membuat model matematis dari pengaruh Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan sehingga dari model tersebut diketahui besarnya perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan jika dilaksanakan Penerapan Prinsip

GCG. Analisis regresi linier sederhana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:270) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dengan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i) - (\sum X_i)(n \sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Dengan menggunakan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang diperoleh.

Tabel 4.18

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,244	7,520		-,431	,671
	X	,536	,092	,786	5,827	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = -3,244 + 0,536 X$$

Dari persamaan linier sederhana di atas dapat dilihat besarnya konstanta adalah -3,244 berarti nilai Informasi Kinerja Keuangan (Y) pada saat tidak ada Penerapan Prinsip GCG atau variabel bebasnya sama dengan nol adalah -3,244. Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X) bertanda negatif menunjukkan adanya peningkatan yang tidak searah antara Penerapan Prinsip GCG (X) dengan Informasi Kinerja Keuangan (Y). Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X)

sebesar 0,536 artinya jika Penerapan Prinsip GCG (X) meningkat satu satuan, maka Informasi Kinerja Keuangan (Y) cenderung meningkat sebesar 0,536.

B. Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan . Berdasarkan rumus yang telah disajikan pada Bab III, maka perhitungan koefisien korelasi dilakukan perhitungan analisis korelasi, digunakan rumus korelasi *pearson* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 ^a	,618	,600	6,59472

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,786. Untuk mengetahui kuat lemahnya koefisien korelasi maka penulis menggunakan kriteria *GUILFORD* sebagai berikut:

Tabel 4.19

Kekuatan Hubungan Antara Variabel X dan Y

≥ 0,00 → < 0,20	Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
≥ 0,20 → < 0,40	Hubungan yang sangat kecil (tidak erat)
≥ 0,40 → < 0,70	Hubungan yang cukup erat

$\geq 0,70 \rightarrow <0,90$	Hubungan yang erat (reliabel)
$\geq 0,90 \rightarrow <1$	Hubungan yang sangat erat

Sumber : Sugiyono (2009:183)

Besarnya koefisien korelasi antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan sebesar 0,786 artinya hubungan kedua variabel tersebut berkorelasi kuat. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya semakin baik kualitas Penerapan Prinsip GCG, maka Informasi Kinerja Keuangan semakin meningkat.

C. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi dipergunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar perubahan Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Untuk menelusuri hal tersebut dapat ditentukan dengan menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = koefisien determinasi
r = koefisien korelasi

Sehingga:

$$\begin{aligned} KD &= 0,786^2 \times 100\% \\ &= 0,618 \times 100\% \\ &= 61,8\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai $KD = 0,618$ atau 61,8%. Nilai ini menunjukkan besarnya pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Dari 61,8% perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan disebabkan oleh perubahan Penerapan Prinsip GCG. Pengaruh faktor-faktor lain

yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar $(100\% - 61,8\% = 38,2\%)$. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh faktor lain diluar dari variabel Penerapan Prinsip GCG.

D. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah Penerapan Prinsip GCG mempunyai pengaruh terhadap variabel Informasi Kinerja Keuangan, maka penulis akan mengujinya dengan penggunaan statistik Uji t dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Penerapan Prinsip GCG tidak terdapat pengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

H_1 : terdapat pengaruh antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

Dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis Uji t adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai uji t (t hitung)

r = Nilai koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

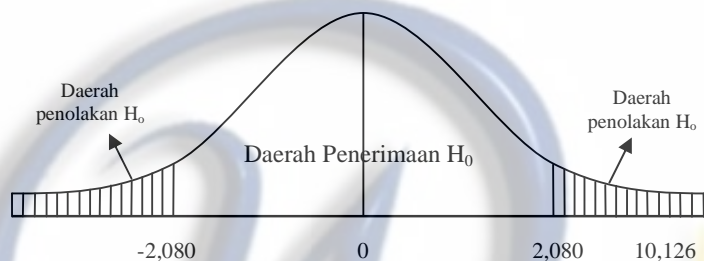
(n-2) = Derajat kebebasan distribusi atau uji t

Maka:

$$t_{hitung} = 0,786 \sqrt{\frac{23-2}{1-(0,786^2)}} = 5,827$$

Dimana t tabel = $t_{(0,05 ; 21)} = 2,080$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 5,827. Dengan $\alpha=0,05$ dan $df=21$, maka di dapat t tabel 2,080. Dikarenakan nilai t hitung $>$ t tabel ($5,827 > 2,080$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Jika disajikan dalam kurva Uji t maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.5
Pengujian Hipotesis (Kurva Uji-t)

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t dan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung berada dalam daerah penerimaan H_0 , dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan .

4.2.4 Analisis Regresi Untuk Data Kabupaten Cirebon

A. Persamaan Regresi

Penggunaan analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk membuat model matematis dari pengaruh Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan sehingga dari model tersebut diketahui besarnya

perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan jika dilaksanakan Penerapan Prinsip GCG. Analisis regresi linier sederhana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:270) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dengan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i) - (\sum X_i)(n \sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Dengan menggunakan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Tabel 4.20

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9,178	8,161		-1,125	,277
	X	,646	,099	,852	6,496	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = -9,178 + 0,646 X$$

Dari persamaan linier sederhana di atas dapat dilihat besarnya konstanta adalah -9,178 berarti nilai Informasi Kinerja Keuangan (Y) pada saat tidak ada Penerapan Prinsip GCG atau variabel bebasnya sama dengan nol adalah -9,178. Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X) bertanda negatif menunjukkan adanya peningkatan yang tidak searah antara Penerapan Prinsip GCG (X) dengan

Informasi Kinerja Keuangan (Y). Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X) sebesar 0,646 artinya jika Penerapan Prinsip GCG (X) meningkat satu satuan, maka Informasi Kinerja Keuangan (Y) cenderung meningkat sebesar 0,646.

B. Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan. Berdasarkan rumus yang telah disajikan pada Bab III, maka perhitungan koefisien korelasi dilakukan perhitungan analisis korelasi, digunakan rumus korelasi *pearson* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,852 ^a	,725	,708	3,96102

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,852. Untuk mengetahui kuat lemahnya koefisien korelasi maka penulis menggunakan kriteria *GUILFORD* sebagai berikut:

Tabel 4.21

Kekuatan Hubungan Antara Variabel X dan Y

≥ 0,00 → < 0,20	Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
≥ 0,20 → < 0,40	Hubungan yang sangat kecil (tidak erat)
≥ 0,40 → < 0,70	Hubungan yang cukup erat

$\geq 0,70 \rightarrow <0,90$	Hubungan yang erat (reliabel)
$\geq 0,90 \rightarrow <1$	Hubungan yang sangat erat

Sumber : Sugiyono (2009:183)

Besarnya koefisien korelasi antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan sebesar 0,852 artinya hubungan kedua variabel tersebut berkorelasi sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya semakin baik kualitas Penerapan Prinsip GCG, maka Informasi Kinerja Keuangan semakin meningkat.

C. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi dipergunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar perubahan Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Untuk menelusuri hal tersebut dapat ditentukan dengan menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = koefisien determinasi
r = koefisien korelasi

Sehingga:

$$\begin{aligned} KD &= 0,852^2 \times 100\% \\ &= 0,725 \times 100\% \\ &= 72,5\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai $KD = 0,725$ atau 72,5%. Nilai ini menunjukkan besarnya pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Dari 72,5% perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan disebabkan oleh perubahan Penerapan Prinsip GCG. Pengaruh faktor-faktor lain

yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar $(100\% - 72,5\% = 27,5\%)$. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh faktor lain diluar dari variabel Penerapan Prinsip GCG.

D. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah Penerapan Prinsip GCG mempunyai pengaruh terhadap variabel Informasi Kinerja Keuangan, maka penulis akan mengujinya dengan penggunaan statistik Uji t dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Penerapan Prinsip GCG tidak terdapat pengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

H_1 : terdapat pengaruh antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

Dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis Uji t adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai uji t (t hitung)

r = Nilai koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

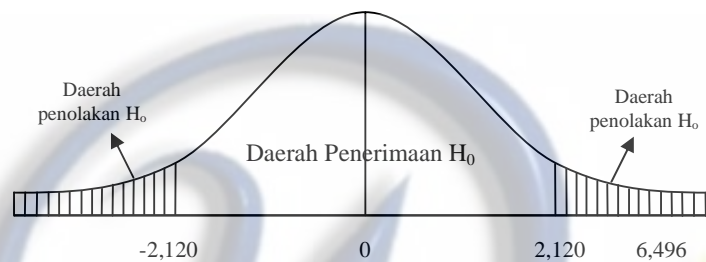
(n-2) = Derajat kebebasan distribusi atau uji t

Maka:

$$t_{hitung} = 0,852 \sqrt{\frac{18-2}{1-(0,852^2)}} = 6,496$$

Dimana t tabel = $t_{(0,05; 16)} = 2,080$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 6,120. Dengan $\alpha=0,05$ dan $df=16$, maka di dapat t tabel 2,080. Dikarenakan nilai t hitung $>$ t tabel ($6,496 > 2,120$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Jika disajikan dalam kurva Uji t maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.6
Pengujian Hipotesis (Kurva Uji-t)

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t dan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung berada dalam daerah penerimaan H_0 , dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan .

4.2.5 Analisis Regresi Untuk Data Kabupaten Sumedang

A. Persamaan Regresi

Penggunaan analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk membuat model matematis dari pengaruh Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan sehingga dari model tersebut diketahui besarnya perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan jika dilaksanakan Penerapan Prinsip

GCG. Analisis regresi linier sederhana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:270) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dengan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i) - (\sum X_i)(n \sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Dengan menggunakan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Tabel 4.22

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,036	3,742		,544	,589
	X	,436	,050	,800	8,746	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = 2,036 + 0,436 X$$

Dari persamaan linier sederhana di atas dapat dilihat besarnya konstanta adalah 2,036 berarti nilai Informasi Kinerja Keuangan (Y) pada saat tidak ada Penerapan Prinsip GCG atau variabel bebasnya sama dengan nol adalah 2,036. Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X) bertanda positif menunjukkan adanya peningkatan yang searah antara Penerapan Prinsip GCG (X) dengan Informasi Kinerja Keuangan (Y). Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X)

sebesar 0,436 artinya jika Penerapan Prinsip GCG (X) meningkat satu satuan, maka Informasi Kinerja Keuangan (Y) cenderung meningkat sebesar 0,436.

B. Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan . Berdasarkan rumus yang telah disajikan pada Bab III, maka perhitungan koefisien korelasi dilakukan perhitungan analisis korelasi, digunakan rumus korelasi *pearson* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,800 ^a	,640	,632	3,48185

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,800. Untuk mengetahui kuat lemahnya koefisien korelasi maka penulis menggunakan kriteria *GUILFORD* sebagai berikut:

Tabel 4.23

Kekuatan Hubungan Antara Variabel X dan Y

$\geq 0,00 \rightarrow < 0,20$	Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
$\geq 0,20 \rightarrow < 0,40$	Hubungan yang sangat kecil (tidak erat)
$\geq 0,40 \rightarrow < 0,70$	Hubungan yang cukup erat
$\geq 0,70 \rightarrow < 0,90$	Hubungan yang erat (reliabel)
$\geq 0,90 \rightarrow < 1$	Hubungan yang sangat erat

Sumber : Sugiyono (2009:183)

Besarnya koefisien korelasi antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan sebesar 0,800 artinya hubungan kedua variabel tersebut berkorelasi sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya semakin baik kualitas Penerapan Prinsip GCG, maka Informasi Kinerja Keuangan semakin meningkat.

C. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi dipergunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar perubahan Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Untuk menelusuri hal tersebut dapat ditentukan dengan menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = koefisien determinasi
r = koefisien korelasi

Sehingga:

$$\begin{aligned} KD &= 0,800^2 \times 100\% \\ &= 0,640 \times 100\% \\ &= 64,0\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai $KD = 0,640$ atau $64,0\%$. Nilai ini menunjukkan besarnya pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan. Dari $64,0\%$ perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan disebabkan oleh perubahan Penerapan Prinsip GCG. Pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar $(100\% - 64,0\% = 36,0\%)$. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh faktor lain diluar dari variabel Penerapan Prinsip GCG.

D. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah Penerapan Prinsip GCG mempunyai pengaruh terhadap variabel Informasi Kinerja Keuangan, maka penulis akan mengujinya dengan penggunaan statistik Uji t dengan hipotesis sebagai berikut:

H_o : Penerapan Prinsip GCG tidak terdapat pengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

H_1 : terdapat pengaruh antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

Dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis Uji t adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai uji t (t hitung)

r = Nilai koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

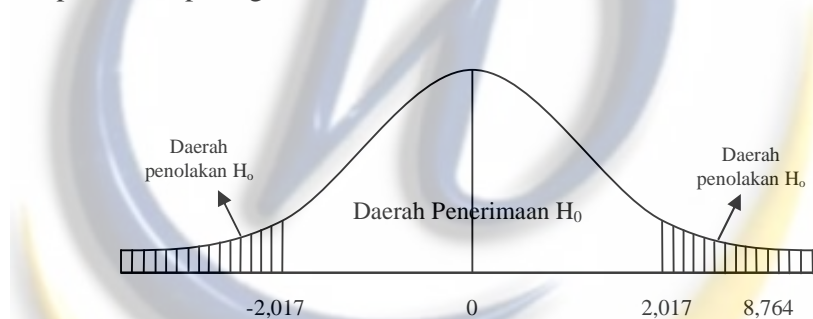
(n-2) = Derajat kebebasan distribusi atau uji t

Maka:

$$t_{hitung} = 0,800 \sqrt{\frac{45-2}{1-(0,800^2)}} = 8,764$$

Dimana $t_{tabel} = t_{(0,05; 43)} = 2,017$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 8,764. Dengan $\alpha=0,05$ dan $df=43$, maka di dapat t tabel 2,017. Dikarenakan nilai t hitung $>$ t tabel ($8,764 > 2,017$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Jika disajikan dalam kurva Uji t maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.7

Pengujian Hipotesis (Kurva Uji-t)

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t dan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung berada dalam daerah penerimaan H_0 , dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan .

4.2.6 Analisis Regresi Untuk Data Kabupaten Kuningan

A. Persamaan Regresi

Penggunaan analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk membuat model matematis dari pengaruh Pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan sehingga dari model tersebut diketahui besarnya perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan jika dilaksanakan Penerapan Prinsip GCG. Analisis regresi linier sederhana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:270) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Dengan:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i) - (\sum X_i)(n \sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Dengan menggunakan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Tabel 4.24

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-14,212	10,810		-1,315	,198
X	,691	,146	,642	4,737	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$Y = -14,212 + 0,691 X$$

Dari persamaan linier sederhana di atas dapat dilihat besarnya konstanta adalah -14,212 berarti nilai Informasi Kinerja Keuangan (Y) pada saat tidak ada Penerapan Prinsip GCG atau variabel bebasnya sama dengan nol adalah -14,212. Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X) bertanda positif menunjukkan adanya peningkatan yang searah antara Penerapan Prinsip GCG (X) dengan Informasi Kinerja Keuangan (Y). Koefisien regresi Penerapan Prinsip GCG (X) sebesar 0,691 artinya jika Penerapan Prinsip GCG (X) meningkat satu satuan, maka Informasi Kinerja Keuangan (Y) cenderung meningkat sebesar 0,691.

B. Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan. Berdasarkan rumus yang telah disajikan pada Bab III, maka perhitungan koefisien korelasi dilakukan perhitungan analisis korelasi, digunakan rumus korelasi *pearson* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Berdasarkan rumus di atas maka perhitungan selanjutnya dilakukan dengan menggunakan software SPSS, berikut hasil yang di peroleh.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,642 ^a	,412	,394	4,75329

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan tabel di atas didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,642. Untuk mengetahui kuat lemahnya koefisien korelasi maka penulis menggunakan kriteria *GUILFORD* sebagai berikut:

Tabel 4.25

Kekuatan Hubungan Antara Variabel X dan Y

$\geq 0,00 \rightarrow < 0,20$	Hubungan yang sangat kecil dan bisa diabaikan
$\geq 0,20 \rightarrow < 0,40$	Hubungan yang sangat kecil (tidak erat)
$\geq 0,40 \rightarrow < 0,70$	Hubungan yang cukup erat
$\geq 0,70 \rightarrow < 0,90$	Hubungan yang erat (reliabel)
$\geq 0,90 \rightarrow < 1$	Hubungan yang sangat erat

Sumber : Sugiyono (2009:183)

Besarnya koefisien korelasi antara Penerapan Prinsip GCG dengan Informasi Kinerja Keuangan sebesar 0,642 artinya hubungan kedua variabel tersebut berkorelasi cukup kuat. Korelasi positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya semakin baik kualitas Penerapan Prinsip GCG, maka Informasi Kinerja Keuangan semakin meningkat.

C. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisien Determinasi dipergunakan untuk mengukur atau mengetahui seberapa besar perubahan Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Untuk menelusuri hal tersebut dapat ditentukan dengan menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

KD = koefisien determinasi
r = koefisien korelasi

Sehingga:

$$\begin{aligned} \text{KD} &= 0,642^2 \times 100\% \\ &= 0,412 \times 100\% \\ &= 41,2\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai $\text{KD} = 0,412$ atau 41,2%. Nilai ini menunjukkan besarnya pengaruh Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan. Dari 41,2% perubahan pada Informasi Kinerja Keuangan disebabkan oleh perubahan Penerapan Prinsip GCG. Pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti adalah sebesar $(100\% - 41,2\% = 58,8\%)$. Pengaruh tersebut merupakan pengaruh faktor lain di luar dari variabel Penerapan Prinsip GCG.

D. Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui apakah Penerapan Prinsip GCG mempunyai pengaruh terhadap variabel Informasi Kinerja Keuangan, maka penulis akan mengujinya dengan penggunaan statistik Uji t dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Penerapan Prinsip GCG tidak terdapat pengaruh terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

H_1 : terdapat pengaruh antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan.

Dengan taraf signifikansi sebesar 5% maka rumus yang digunakan untuk pengujian hipotesis Uji t adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai uji t (t hitung)

r = Nilai koefisien korelasi

r^2 = Koefisien determinasi

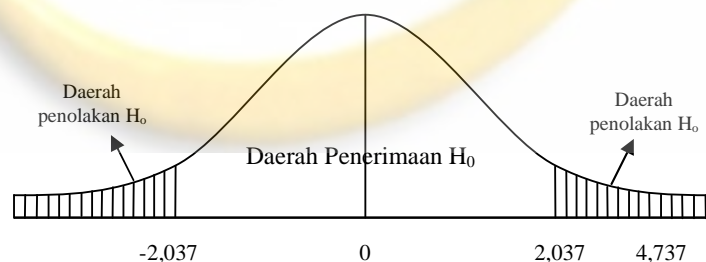
(n-2) = Derajat kebebasan distribusi atau uji t

Maka:

$$t_{hitung} = 0,642 \sqrt{\frac{34-2}{1-(0,642^2)}} = 4,737$$

Dimana t tabel = $t_{(0,05; 32)} = 2,037$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa nilai t hitung adalah sebesar 4,737. Dengan $\alpha=0,05$ dan $df=32$, maka di dapat t tabel 2,037. Dikarenakan nilai t hitung > t tabel ($4,737 > 2,037$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Informasi Kinerja Keuangan . Jika disajikan dalam kurva Uji t maka dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4.8

Pengujian Hipotesis (Kurva Uji-t)

Berdasarkan hasil perhitungan uji-t dan gambar di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai t hitung berada dalam daerah penerimaan H_0 , dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa dengan taraf signifikansi sebesar 5% atau dengan taraf kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip GCG terhadap Informasi Kinerja Keuangan .



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip *Good Corporate Governance* dengan persentase tertinggi pertama ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Cirebon, yakni sebesar 66,80% dengan klasifikasi kategori cukup baik. Persentase tertinggi kedua ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kota Cirebon, yakni sebesar 66,09% dengan klasifikasi kategori cukup baik. Persentase tertinggi ketiga ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Kuningan, yakni sebesar 48,71% dengan klasifikasi kategori kurang baik. Sedangkan persentase terendah ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Sumedang, yakni sebesar 46,35% dengan klasifikasi kategori kurang baik.
2. Informasi Kinerja Keuangan dengan persentase tertinggi pertama ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Cirebon, yakni sebesar 94,72% dengan klasifikasi kategori sangat baik. Persentase tertinggi kedua ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kota Cirebon, yakni sebesar 90,11% dengan klasifikasi kategori baik. Persentase tertinggi ketiga ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Kuningan, yakni sebesar 86,25% dengan klasifikasi kategori baik. Sedangkan persentase terendah ditunjukkan pada wilayah kerja PDAM Kabupaten Sumedang, yakni sebesar 83,96% dengan klasifikasi kategori baik.

3. PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon dan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon berada dalam kondisi sehat, tetapi tidak dapat meraih keuntungan. Hal tersebut karena terdapat kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu tidak mendapat alokasi dana yang memadai, serta adanya hutang yang cukup besar pada periode sebelumnya. Kendala eksternal adalah tarif yang masih rendah sehingga tidak bisa menutupi biaya operasional dan hutang. Tarif BBM dan listrik yang tinggi juga menjadi kendala dalam membiayai operasional PDAM.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Informasi Kinerja Keuangan di PDAM Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Besarnya nilai persentase pengaruh pada PDAM Kota Cirebon adalah 54,7%, pada PDAM Kabupaten Cirebon adalah 62,8%, pada PDAM Kabupaten Sumedang adalah 25,3% sedangkan pada PDAM Kabupaten Kuningan adalah 12,3%.
- Secara bersamaan, besarnya pengaruh dimensi-dimensi *Good Corporate Governance* terhadap informasi kinerja keuangan adalah sebesar 84,1%. Sedangkan secara terpisah, variabel *Responsibility* (X_3) memiliki pengaruh paling besar yakni 19,08%. Sedangkan variabel *Transparency* (X_1) memiliki pengaruh paling kecil yakni sebesar 14,11%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dapat diterapkan sepenuhnya dalam tubuh PDAM. Hal ini membutuhkan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah daerah dimana PDAM harus sepenuhnya diberikan kewenangan dalam menata sistem dan mengelola organisasi perusahaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Selain itu, hendaknya mekanisme *Good Corporate Governance* dapat diterapkan seperti adanya komisaris independen yang bukan kepala daerah (Bupati atau Walikota), untuk menghindari adanya konflik kepentingan yang selama ini terjadi dalam penunjukan Direktur PDAM.
2. Penerapan *Good Corporate Governance* juga membutuhkan adanya peningkatan kualitas kinerja dan perubahan budaya organisasi dari aparaturnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya perusahaan yang baru dan mencerminkan penerapan budaya perusahaan yang sesuai dengan prinsip GCG. Selain itu, hendaknya pihak PDAM mengintensifkan program pelatihan dan pendidikan bagi seluruh karyawan agar kualitas sumber daya manusia dapat meningkat.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menjangkau 4 PDAM di Wilayah Jawa Barat. Untuk penelitian selanjutnya, agar mendapatkan data dan gambaran yang lebih lengkap dapat menambah lokasi penelitian yaitu seluruh PDAM yang berada di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, 2005. Teori Keuangan dan Pasar Modal, Ekonisia, Yogyakarta.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya Dalam Konsep Indonesia*. Ray Indonesia, Jakarta
- Denis, D.K. dan McConnell, J.J. (2008). "International Corporate Governance." Working Paper of Purdue University
- Efendi, 2009. Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, dan Risiko Sistematis. Jurnal Ikatan Akuntansi Indonesia. Tidak Diterbitkan
- Gordon, B Davis (2002), Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : PTM
- Griffin, Ricky W dan Ebert, J Ronald. 1995. Business. Perason International Edition. New Jersey : Prentice Hall
- Ikatan Akuntan Indonesia (1996), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat
- Junaedi, Dedi. 1995. Dampak Tingkat Pengungkapan Informasi Perusahaan terhadap Volume Perdagangan Return Saham : Penelitian Empiris Terhadap perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa Efek Jakarta. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.2 No.2
- Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN
- Mulyadi, (2005). Akuntansi Manajemen. Yogyakarta : STIE YKPN
- Munawir S. (2010). Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Prakarsa, Wahyudi, (2009). Sistem Pengukuran Kinerja-Pendekatan Kontemporer, Diskusi Nasional, Jakarta
- Riyanto. Bambang, (2008), Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yogyakarta: Gajah Mada
- Saefulloh, Asep Ahmad. (2009). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada BUMD, Studi Kasus di Propinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan. Jurnal "Kajian" No.1 Vol.15 Maret 2009
- Salam, Abdul Salim. 2003. Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sawir. Agnes. 2005. Analsis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan. Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Siswantaya, I Gede. 2007. Mekanisme Corporate Governance dan Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Sugiyono, (2006). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.
- Sutedi. Adrian (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika
- Yogianto (1992) Sistem Informasi Akuntansi Dan Organisasi Perusahaan. Jakarta. Erlangga
- Yustivandana. Ivan (2006), Penerapan *Good Corporate Governanace : Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, ed. 1, cet. 1. Jakarta : Kencana Perdana Group.
- Zarkasyi, M. Wahyudin. 2008, "Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya", Bandung: Alfabeta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 1999 Tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 Tentang Peneraan
Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negera
(BUMN)
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.11 Tahun 2011





LAMPIRAN 1 :
Surat Survey Penelitian



LAMPIRAN 2 :
Surat Keterangan Perusahaan



LAMPIRAN 3 :
Kuesioner Penelitian

PERTANYAAN KUESIONER

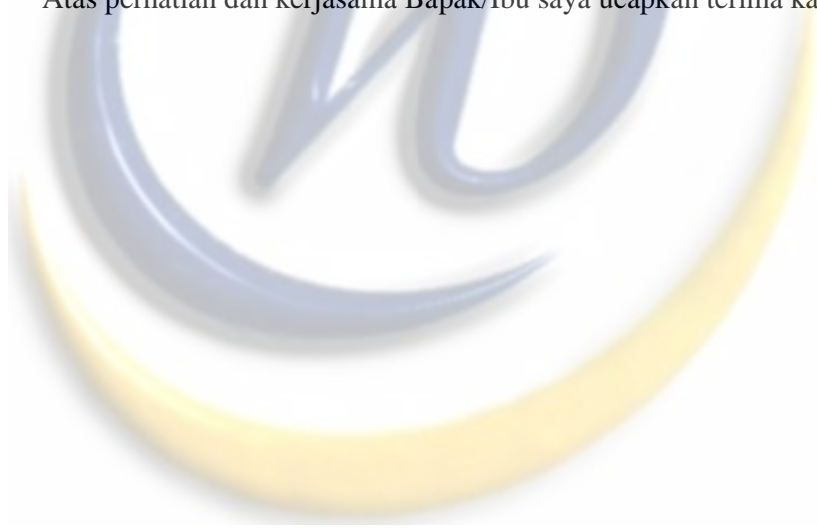
Kepada Yth.
Bapak / Ibu Responden
Di Tempat

Dengan Hormat,

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak / Ibu meluangkan waktu dalam mengisi kuisisioner ini. Kuisisioner ini merupakan alat untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Informasi Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon dan PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon)”**.

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, saya mohon agar Bapak/Ibu membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian dan menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan yang tinggi tanpa suatu keraguan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jawaban Bapak/ Ibu hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik, yaitu menyelesaikan studi saya pada JurusanUniversitas Widyatama Bandung.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.



ISIAN KUISIONER

Nama / Instansi :

BIODATA RESPONDEN

Berilah tanda \surd atau x pada kotak pilihan yang disediakan. Apabila preferensi pilihan tidak tersedia, mohon isikan secara tertulis pada titik-titik yang disediakan.

Jenis Kelamin : () Pria () Wanita
Usia :
Bekerja pada Bagian :
Tingkat Pendidikan Terakhir : () D3/Akademik () S1
() S2 () S3
Masa bekerja di perusahaan : () < 5 tahun () 5-10 tahun
() > 10-15 tahun () > 15 tahun

DATA PENELITIAN

Petunjuk pengisian

Pertanyaan dirancang dengan alternatif jawaban :

1. STS (Sangat tidak setuju)
2. TS (Tidak setuju)
3. KS (Kurang Setuju)
4. S (Setuju)
5. SS (Sangat setuju)

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat untuk setiap pertanyaan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu dengan cara memberi tanda (\surd) pada kolom jawaban yang telah disediakan.

Variabel X : Good Corporate Governance

Tranparancy

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Kebijakan perusahaan telah dilakukan secara tertulis dan secara proporsional telah dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.					
2.	Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.					
3.	Manajemen harus meminta audit internal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan dan dalam menunjang penerapan GCG					
4.	Informasi laporan keuangan yang disampaikan telah disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.					
5.	Prinsip Transparansi tidak mengurangi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.					

Accountability

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
6.	Perusahaan telah menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ					

	perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi					
7.	Perusahaan memastikan bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan GCG.					
8.	Perusahaan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.					
9.	Perusahaan telah memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan.					
10.	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (<i>code of conduct</i>) yang telah disepakati.					

Responsibility

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
11.	Perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.					
12.	Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan.					
13.	Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar kepada Dewan dan komisaris serta pemegang saham.					
14.	Perusahaan selalu melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan prinsip yang sehat					

Independency

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
15.	Masing-masing organ perusahaan menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan					
16.	Penetapan Dewan Komisaris dan Direksi serta jabatan penting lainnya dilakukan secara independen					
17.	Tidak saling melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.					
18.	Pengambilan keputusan dilakukan dilakukan secara objektif, tanpa adanya intervensi dan kepentingan dari pihak manapun					

Fairness

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
19.	Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.					
20.	Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.					
21.	Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras dan gender.					

VARIABEL Y : Informasi Kinerja Keuangan

Akurat

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
22.	Informasi kinerja keuangan yang disampaikan perusahaan dengan benar dan tanpa kesalahan					
23.	Isi informasi kinerja keuangan yang disampaikan jelas dan dapat dimengerti					

24.	Informasi kinerja keuangan disusun dan dilaporkan sesuai dengan data dan fakta yang ada					
-----	---	--	--	--	--	--

Tepat Waktu

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
25.	Informasi kinerja keuangan dilaporkan secara periodik					
26.	Informasi kinerja keuangan dilaporkan sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan kinerja perusahaan yang telah ditentukan					

Relevan

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
27.	Isi informasi kinerja keuangan disampaikan sesuai dengan ketentuan laporan kinerja keuangan yang telah ditentukan					
28.	Informasi kinerja keuangan selalu menyajikan informasi terbaru dari kondisi keuangan perusahaan					
29.	Isi informasi kinerja keuangan sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan gambaran perkembangan terkini kondisi keuangan perusahaan					

Nilai Informasi

No	Kuesioner	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
30.	Isi informasi kinerja keuangan bermanfaat bagi <i>stakeholder</i> dalam mengambil keputusan yang dianggap perlu bagi perusahaan					
31.	Informasi kinerja keuangan telah disusun dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip laporan akuntansi dan ketentuan perusahaan sehingga dapat dipercaya					
32.	Informasi kinerja keuangan dilaporkan secara terbuka mudah diakses oleh <i>stakeholder</i>					





LAMPIRAN 5 :
Kartu Bimbingan Skripsi



LAMPIRAN 6 :
Surat Revisi Skripsi